

Laporan Penelitian Individual

**Peran Perempuan Kelas Menengah NU
dalam Penguatan Civil Society di Kabupaten Sidoarjo**



PENELITI:

IVA YULIANTI UMDATUL IZZAH, M.SI
NIP. 197607182008122100

Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

**Berdasarkan Surat Keputusan Rektor
IAIN Sunan Ampel Nomor: In.02/1/PP.00.9/292/P/2013**

SURABAYA
2013

Laporan Penelitian Individual

**Peran Perempuan Kelas Menengah NU
dalam Penguatan Civil Society di Kabupaten Sidoarjo**



PENELITI:

IVA YULIANTI UMDATUL IZZAH, M.SI
NIP. 197607182008122100

Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

**Berdasarkan Surat Keputusan Rektor
IAIN Sunan Ampel Nomor: In.02/1/PP.00.9/292/P/2013**

SURABAYA
2013

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN INDIVIDUAL

1. a. Judul Penelitian : Peran Perempuan Kelas Menengah NU Dalam Penguatan Civil Society di Kabupaten Sidoarjo
- b. Bidang Ilmu :
 c. Kategori : Individu
2. Ketua Peneliti :
 a. Nama Lengkap/NIP. : IVA YULIANTI UMDATUL IZZAH, M.SI
 NIP. 197607182008122100
 b. Jenis Kelamin : Perempuan
 c. Pangkat/Golongan : III/ C (Lektor)
 d. Jabatan Fungsional : Dosen
 e. Jabatan Struktural : -
 f. Fakultas/Jurusan : Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
 g. Lembaga Penelitian : IAIN Sunan Ampel Surabaya
 h. Bidang Ilmu yang Diteliti :
3. Jumlah Peneliti : 1 orang
4. Lokasi Penelitian :
5. Bila Penelitian ini merupakan peningkatan kerjasama kelembagaan sebutkan
 a. Nama Instansi : IAIN Sunan Ampel
 b. Alamat : Jl. A. Yani 117 Surabaya
6. Lama Penelitian : 3 bulan
7. Biaya yang diperlukan : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Surabaya, Desember 2013

Mengetahui:
Kepala Pusat Penelitian



Dr. ABDUL CHALIK, M.Ag
NIP. 197306272000031002

Peneliti,



IVA YULIANTI UMDATUL IZZAH, M.SI
NIP. 197607182008122100

Menyetujui
Ketua LPPM IAIN Sunan Ampel

DR. H. MUH. FATHONI HASYIM, M.Ag
NIP.195601101987031001

ABSTRACT

The phenomenon of the middle class is always interesting to be further researched. By using qualitative methods, this study intends to find out how the role of middle class woman who are members of the Nahdlatul Ulama organizations, Muslimat and Fatayat in strengthening civil society in Sidoarjo. The research results revealed that middle class women Nahdlatul Ulama has a great role in the society in Sidoarjo. Nahdlatul Ulama middle class woman who are members of the part of Nahdlatul Ulama organization have contributed greatly to the community through roles they do. These roles are performed in various sector such as law, politics and advocacy; health; social and economic; education; illumination and arts and culture.

The great roles of Nahdlatul Ulama middle class woman in demonstrating their existence as a wing of the largest social-religious organization that is to establish an empowered society and cultures as well as reinforce the existence of the community through some programs. There is awareness of the Nahdlatul Ulama women organizations that must become agent of change and the democratization of society at in local level and national level. And its form of strengthening civil society has been done by middle class women of the Nahdlatul Ulama. As an organization whose members are women, Muslimat and Fatayat has a responsibility to provide awareness and empowering people, especially women. The women of the middle class Nahdlatul Ulama has shown them that such a role in the context of strengthening civil society at the national level in general and in particular the local level.

Keywords: Nahdlatul Ulama middle class woman, civil society

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Segala puji bagi Allah tuhan semesta Alam yang mempunyai sifat rohman bagi semua mahluk dan mempunyai sifat rohim bagi umat islam, yang selalu memberikan kenikmatan dan curahan rahmat yang berlimpah pada penelitisehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW yang menjadi Rahmatan Lil Alamin, yang selalu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita kepada zaman terang benderang disertai iman dan islam seperti saat ini.

Setelah melewati proses penyelesaian, berkat dukungan serta doa dari orang-orang terdekat, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya. Hal ini merupakan berkah serta rahmat yang akan selalu peneliti kenang dan syukuri.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof Dr. Abd A'la, M.Ag, selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya beserta staf-stafnya.
2. Dr. Abd Chalik, M.Ag selaku Kepala Pusat Penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Segenap dewan Dosen yang telah memberikan masukan kepada kami.
4. Segenap pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian penelitian ini.

Tidak ada yang dapat kami berikan sebagai balasan atas semua bantuan. Doa, dukungan serta motivasi dan segala partisipasi yang di berikan oleh

semuanya. Semoga dicatat sebagai amal Sholeh dan diberikan balasan yang berkali-kali lipat oleh Allah SWT. Dalam pengerjaannya peneliti banyak melakukan kesalahan. Kritik dan saran untuk lebih memperbaiki karya peneliti ini akan selalu kami harapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena peneliti hanyalah manusia biasa sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Abstract	ii
Daftar Isi	iii
	Peneliti
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	8
F. Metode Penelitian	
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Penentuan Subyek dan Lokasi Penelitian	18
3. Teknik Pengumpulan Data	21
4. Teknik Analisis Data	23
5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	24
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II PEREMPUAN KELAS MENENGAH NAHDLATUL ULAMA DAN CIVIL SOCIETY DALAM PERSPEKTIF TEORI	
A. Konsep Kelas Menengah	26
B. Perempuan Kelas Menengah Nahdlatul Ulama	31
C. Peran Kelas Menengah Nahdlatul Ulama	35
D. Civil Society dan Kelompok Muslim di Indonesia	38
E. Lembaga Sosial Keagamaan Wahana Pengembangan Civil Society	42

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Abstract	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	8
F. Metode Penelitian	
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Penentuan Subyek dan Lokasi Penelitian	18
3. Teknik Pengumpulan Data	21
4. Teknik Analisis Data	23
5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	24
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II PEREMPUAN KELAS MENENGAH NAHDLATUL ULAMA DAN CIVIL SOCIETY DALAM PERSPEKTIF TEORI	
A. Konsep Kelas Menengah	26
B. Perempuan Kelas Menengah Nahdlatul Ulama	31
C. Peran Kelas Menengah Nahdlatul Ulama	35
D. Civil Society dan Kelompok Muslim di Indonesia	38
E. Lembaga Sosial Keagamaan Wahana Pengembangan Civil Society	42

BAB III PERAN PEREMPUAN KELAS MENENGAH NAHDLATUL

ULAMA DALAM MASYARAKAT

A. Perempuan Kelas Menengah Nahdlatul Ulama dan Perannya	47
B. Peran di Bidang Hukum, Politik dan Advokasi	49
C. Peran di Bidang Sosial dan Ekonomi	53
D. Peran di Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	56
E. Peran di Bidang Pendidikan	59
F. Peran di Bidang Penerangan dan Dakwah	62
G. Peran di Bidang Seni dan Budaya	65
H. Peran dalam Lembaga Swadaya Masyarakat	
1. Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	67
2. Lembaga Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB)	75
3. Lembaga Gabungan Organisasi Wanita (GOW).....	77

BAB IV PERAN PEREMPUAN KELAS MENENGAH NAHDLATUL

ULAMA DALAM PENGUATAN CIVIL SOCIETY DI

KABUPATEN SIDOARJO	79
---------------------------------	-----------

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	99
B. Saran	102
Daftar Pustaka	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membicarakan kelas menengah di Indonesia merupakan hal yang sangat menarik perhatian. Hal tersebut antara lain disebabkan karena menguatnya beragam akses kehidupan yang memberikan peluang bagi tumbuh berkembangnya kelas menengah, terutama kaum perempuan. Sistem pemerintahan yang baik (*clean and good governance*), pertumbuhan ekonomi masyarakat yang makin baik, menguatnya kesadaran masyarakat terhadap dunia pendidikan, akseptabilitas dunia pendidikan bagi semua golongan, iklim demokratisasi yang makin terbuka serta berkurangnya dominasi kultur patriarki mengakibatkan makin terbukanya akses kaum perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan.

Beragam akses tersebut saat ini menghasilkan fenomena sosio-kultural baru di Indonesia yakni makin berkembangnya kelas menengah dalam hal jumlah dan peran serta mereka dalam masyarakat. Mereka mampu berkontribusi dalam segala aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya. Hal yang menarik adalah makin meningkatnya secara signifikan jumlah kelas menengah di Indonesia, yakni 130-140 juta jiwa penduduk kelas menengah baik laki-laki maupun perempuan, dan ini berarti lebih dari separuh jumlah total penduduk

Indonesia.¹ Meskipun indikator yang digunakan adalah indikator ekonomi, namun hal tersebut merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati.

Kelas menengah yang kemudian menjadi lapisan masyarakat baru di Indonesia sebenarnya muncul sejak tahun 1980-an seiring adanya modernisasi yaitu kenaikan pertumbuhan ekonomi dan transformasi pendidikan. Hefner (1993, 1997), Kuntowijoyo (1993), Arif Budiman (1994), Ramage (1995) dan lainnya berkesimpulan bahwa kelas sosial ekonomi baru telah muncul secara fenomenal di Indonesia sebagai sebuah kelas menengah. Menurut Robison², dalam golongan kelas menengah ini mencakup kaum cendekiawan (akademisi), intelektual, teknokrat, tokoh-tokoh politik, reformis, pengusaha muda, pengacara, aktifis kebudayaan, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), publik figur, juru dakwah, artis, pengamat ekonomi, dan sejenisnya. Berkembangnya fenomena kelas menengah saat ini dianggap sebagai pertanda meningkatnya kesejahteraan serta arah positif proses demokratisasi di Indonesia.

Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka merupakan hal yang wajar jika pertumbuhan kelas menengah muslimnya merangkak naik dengan disertai keterlibatan peranan mereka dalam kehidupan masyarakat, baik di tingkat local maupun tingkat nasional.

¹ Kompas, 8 Juni 2012

² Richard Robison, "The Middle Class and The Bourgeoisie in Indonesia". Richard Robison and David S.G. Goodman, eds., *The New Rich in Asia, Mobile Phones, McDonald's and Middle Class Revolution*. London and New York: Routledge, 1993, hal. 60

Bambang Pranowo³, berpendapat bahwa kelas menengah muslim Indonesia memegang peran penting dalam proses demokratisasi di Indonesia. Munculnya organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai bagian dari proses demokratisasi di Indonesia merupakan hal yang tak terbantahkan dari munculnya kelas ini.

Ketika berbicara tentang kelas menengah di Indonesia, maka mau tak mau juga memperbincangkan kelas menengah muslim di Indonesia. Karena mayoritas penduduk Indonesia (88,2 % dari total jumlah penduduk) adalah beragama Islam. Upaya penguatan civil society di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan umat Islam sebagai mayoritas. Keberadaan umat muslim di Indonesia di sebagian wilayah dan pada beberapa kasus tertentu merupakan penggerak perubahan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia. Dalam upaya penguatan civil society di Indonesia, umat Islam memiliki peran penting sebagai penggerak yang memberi corak ke arah mana kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu akan dibawa.

Dan jika kita berbicara mengenai penduduk muslim, maka mau tak mau pula kita juga harus berbicara mengenai kaum perempuan. Sebagian besar dari kelas menengah muslim tersebut adalah kaum perempuan. Mereka banyak berperan dalam berbagai ranah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

³ Pranowo, Bambang, *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, Jakarta: Adicita Karya Nusa, 1998, hal. 106.

Dalam ranah kehidupan bermasyarakat, banyak sekali terdapat kaum perempuan muslim yang memiliki peranan penting dalam berbagai lembaga dan kegiatan ekonomi seperti developer (properti), Usaha Kecil dan Menengah (UKM), *home industry*, lembaga keuangan dan lain sebagainya. Sementara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini banyak sekali kaum perempuan muslim yang masuk ranah birokrasi. Mereka sengaja direkrut oleh pemerintah berdasarkan kualifikasi dan kebutuhan departemen yang mengutamakan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Selain hal tersebut, juga makin banyaknya kaum perempuan yang masuk ranah politik, dimana sebelumnya menjadi sesuatu yang tabu dilakukan, kini semakin banyak perempuan yang memegang posisi penting dalam bidang politik. Apalagi pasca reformasi 1998 didukung oleh makin kuatnya desakan masyarakat agar kaum perempuan menjadi aktor penting yang perlu dilembagakan melalui sistem kuota 30% dalam partai politik maupun dalam legislatif, baik di tingkat pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat.

Kelompok kelas menengah muslim diharapkan peranannya dalam penguatan *civil society* karena mereka adalah kelompok yang paling kritis baik dilihat dari posisi sosialnya maupun sikap politik terhadap hegemoni negara modern. Kelompok ini diharapkan menjadi tulang punggung *civil society* di Indonesia, karena tidak hanya melakukan berbagai program untuk kesejahteraan masyarakat, namun juga memelihara tumbuh suburnya demokrasi.

Namun demikian, munculnya kelas menengah di kalangan perempuan muslim Indonesia tidak serta merta berkorelasi positif dengan kontribusi peran mereka dalam konstelasi perubahan sosial. Sebagai contoh, mereka yang berprofesi sebagai developer, Usaha Kecil Menengah (UKM), home industri, lembaga keuangan hanya mengutamakan *profit oriented* tanpa peduli terhadap pembentukan apalagi pengembangan *civil society* di lingkungan mereka.

Sedangkan mereka yang duduk di lembaga pemerintahan justru jarang melakukan kritik terhadap atasan atau lembaganya sendiri. Mereka yang masuk dalam ranah politik, secara realitas sebagian dari mereka memiliki kontribusi riil terhadap proses kritik-otokritik terhadap kebijakan pemerintah dan partainya, namun sebagian yang lain dari mereka justru berbanding terbalik, yakni memanfaatkan kelompok dan partainya sebagai sarana popularitas diri, ajang memperkaya diri, wadah menyelamatkan diri dari jeratan hukum yang menimpa diri atau keluarganya serta sebagai batu loncatan politik dalam ajang kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

Sebuah kelas sebagai sebuah identitas kolektif (*collective identity*) dibentuk oleh banyak kode-kode sosial dan tergantung dari bentuk kesetiaan, komitmen, atribut (*ascription*) dan afiliasi yang menentukannya seperti bahasa, agama, ideologi.⁴

⁴ Aparno Rao. "The Many Sources of Identity: an Example of Changing Affiliations in Rural Jammu and Kashmir". *Ethnic and Racial Studies* Vol. 22, No.1 January, 1999, hal. 56

Selain itu, hal lain yang ikut menentukan antara lain pakaian, mode (*fashion*), selera (*taste*) dan lain-lain. Kode-kode sosial ini mengikat "anggota-anggota" dan memunculkan simbol-simbol kelompok menjadi sebuah identitas kolektif. Identitas kolektif dibentuk oleh beberapa kode kelas. Di Indonesia sejak tahun 1980an, terdapat saluran ekspresi yang luas sebagai kode-kode yang saling menunjang dan melengkapi yang telah membentuk kelas sosial baru yaitu kesadaran sebagai 'kelas menengah muslim.' Kode itu melebihi sekedar kode politik dan kode ekonomi. Kode itu adalah kode kultural.

Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi merupakan komunitas Islam yang sangat menarik untuk dikaji dan dicermati. Keberadaannya sebagai sebuah komunitas muslim secara budaya sangat mengakar dengan nuansa budaya tradisional yang diusungnya. Budaya-budaya khas Nahdlatul Ulama seperti tahlil, jam'iyah, dibaiah, ziarah kubur, ziarah wali, barzanji dan sebagainya merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari organisasi ini. Di samping itu secara kuantitas atau jumlah besar, sebagai organisasi keagamaan yang memiliki anggota terbesar menjadikan organisasi tidak dapat dianggap sebelah mata dan kiprahnya sangat mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama berdasarkan sejarahnya telah banyak berkiprah dalam masyarakat melalui organisasi Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama. Banyak sekali sumbangan mereka yang selama ini belum diketahui oleh masyarakat. Salah satu tujuan

didirikannya organisasi Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama adalah agar perempuan di Indonesia mampu meningkatkan kualitas mereka dan organisasi tersebut adalah pendorong dan penggeraknya.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mendalami masalah ini. Penelitian yang akan dilakukan ini ingin mengetahui bagaimana perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama mengambil peran dalam penguatan *civil society* dalam masyarakat di samping juga terdapat aspek-aspek lain yang menarik perhatian peneliti untuk menelitinya.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengambil bagian mengenai perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya di daerah yang akan diteliti yaitu di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama dalam masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Sidoarjo?
2. Bagaimana peran perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama dalam penguatan *civil society* di Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengidentifikasi serta mendiskripsikan bagaimana peran perempuan kelas menengah muslim di

Indonesia dalam hal ini akan dikhususkan pada peran kelas menengah Nahdlatul Ulama di Sidoarjo , bagaimana perempuan kelas menengah muslim di Indonesia berperan dalam penguatan *civil society* dan demokrasi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Memperkuat dan melengkapi kajian mengenai peran perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama di Sidoarjo khususnya dan di Indonesia umumnya
2. Kemungkinan memperoleh konsep baru yang berkaitan dengan peran perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Definisi mengenai kelas menengah sangatlah luas untuk dideskripsikan. Kuntowijoyo⁵ mencoba mengklasifikasikan kelas menengah muslim berdasarkan tipologi masyarakat jawa menurut Geertz. Menurut Kuntowijoyo, kelas menengah muslim jika dilihat dari status sosialnya mereka termasuk golongan priyayi, namun jika dilihat dari kelas sosial mereka masuk golongan menengah.

Moeslim Abdurrahman⁶ melihat bahwa kelas menengah muslim mengidentifikasi diri mereka dengan menggunakan egaliterianisme seksual progresif sebagai ukuran status mereka dalam masyarakat. Contohnya,

⁵ Kuntowijoyo. *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1991, hal. 133

⁶ Abdurrahman, Moeslim, *Islam yang Memihak*, Yogyakarta: LKiS, 2005, hal. 79-80

busana muslim merupakan simbol identitas kelas menengah muslim yang sangat penting. Ia melihat busana perempuan kelas menengah sebagai aspek dari “simbol kelompok kapital” dimana pakaian dapat menciptakan dan mengukuhkan identitas kolektif maupun personal.

Muhammad A.S. Hikam berpendapat bahwa baik muslim intelektual maupun kelas menengah muslim merupakan basis kelas sosial baru dari kebangkitan Islam di Indonesia. Mereka memainkan peran yang sama dalam proses islamisasi ruang modern. Karena mereka juga memperkenalkan, menteorisasikan, mempopulerkan dan mensosialisasikan gagasan islamisasi dalam hampir setiap dimensi kehidupan seperti mode dan pakaian, tempat tinggal, lembaga akademis, kegiatan ekonomi, kehidupan sosial dan kultural dan juga kehidupan politik.⁷

Sedangkan menurut Cornelis Lay, kelas menengah didefinisikan secara longgar yaitu produk langsung dari proses modernisasi atau pembangunan (ekonomi).⁸ Proses modernisasi inilah yang memberikan alasan bagi terbentuknya kelas menengah di Indonesia. Dan karenanya pilihan-pilihan rute bagi modernisasi merupakan determinan yang menentukan karakteristik dasarnya dari kelas ini yang pada gilirannya akan sangat menentukan tempat dari kelas ini dalam proses demokratisasi sebuah bangsa atau masyarakat.

⁷ Hikam, Muhammad A.S. 2000. *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga, 2000, hal. 66

⁸ Lay, Cornelis, 1997. “Kelas Menengah, Civil Society dan Demokrasi”, *Jurnal Bina Darma*, UKSW, Salatiga No.54, 1997, hal. 24

Karl Marx (1867) menggolongkan masyarakat ke dalam dua kelas: majikan/borjuis yang menguasai alat produksi, keuangan, lahan, dan teknologi produksi serta buruh/proletar yang menjual tenaganya untuk mendapatkan upah. Jika dilihat dari pemikiran Karl Marx yang menggunakan dasar hubungan faktor produksi sebagai pembeda kelas, yaitu kaum pemilik modal (borjuis/kapital) dan kaum buruh (proletar/*working class*), maka kelas menengah dianggap sebagai kelas yang plin-plan, karena tidak ada kelas yang berada diantara kedua kelas tersebut.

Menurut Eric Hiariej, kelas menengah disebut kelas plin-plan karena jika kepentingannya terpenuhi dengan mendekati kelas pemilik modal maka kelompok ini menjadi *capitalist class*, atau jika kepentingannya lebih dekat dengan kelas proletar maka kelas ini menjadi kelas proletar. Pada masa itu, teorisasi Marx tidak menaruh perhatian khusus terhadap pertumbuhan kelas menengah. Tetapi ternyata dalam perkembangan selanjutnya, bahkan setelah satu abad Marx, pertumbuhan kelas menengah menjadi sedemikian cepat dan besar. Awal abad 20 Eropa memunculkan banyak teoritisi Marxism baru mengenai studi kelas menengah.

Selanjutnya, Max Weber (1920) mengelaborasi kelas sosial dengan lebih luas ketika memandang persoalan kelas bukan hanya bagaimana kekuasaan (*power*) atas alat produksi terletak, tetapi juga menyangkut derajat ekonomi dan prestise. Tiga hal itu menjadi penentu untuk mengukur derajat kelas seseorang. Weber berpendapat bahwa kelas sosial terbentuk bukan hanya ditentukan oleh penguasaan alat produksi, tetapi juga kegiatan

konsumtif, status sosial, kewibawaan, serta daya tawar dalam pertukaran pasar.

Menurut Weber, kelas menengah dapat diukur berdasarkan data statistik. Ukuran suatu golongan dimasukkan dalam golongan kelas menengah tidak harus diukur melalui kepemilikan faktor produksi, tetapi bisa merupakan gabungan pendapatan, pendidikan, status sosial, atau semua hal yang bisa diukur secara statistik (kuantifikasi). Penentuan kelas menengah dari pemikiran ini dapat dilihat dari pendapatan yang berada di antara kelompok pendapatan kaya dan di bawah garis kemiskinan. Namun terdapat kritik terhadap Marx dan Weber yang melihat bahwa kelas menengah tidak hanya bisa dilihat dari kepemilikan faktor produksi dan data statistik saja, melainkan juga terdapat faktor kebiasaan, sikap, selera, dan karakter yang bersifat kultural.

Berbeda dengan Marx dan Weber, konsep kelas menurut Bourdieu⁹ tidak semata-mata ditentukan oleh penguasaan atas modal atau kapital ekonomi namun ditentukan oleh habitus, ranah dan selera. Habitus dan ranah dalam konsep Bourdieu tidak dapat dilepaskan dari konsep modal atau kapital. Konsep kapital menurut Bourdieu dibagi dalam empat jenis, yaitu ekonomi, sosial, kultural dan simbolik. Modal atau kapital dalam pandangan Bourdieu tidak hanya dalam bentuk materi saja (ekonomi) namun dapat juga berwujud immaterial seperti jaringan sosial, kultural dan

⁹ Pierre Bourdieu dan Lois J. Wacquant. *An Invitation to Reflexive Sociology*, University of Chicago Press, 1992, hal.101

simbolik. Seseorang meskipun tidak memiliki modal material (ekonomi) akan tetapi jika memiliki jaringan sosial yang kuat, posisi yang bagus di masyarakat, pendidikan yang bagus, pengakuan sosial yang bagus dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai kelas tertentu dan dapat dikonversikan oleh agen atau aktor.

Modal sosial dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah sumber daya baik aktual maupun potensial yang terhubung dengan kepemilikan jaringan atau relasi, yang telah terinstitusionalisasi dalam pemahaman dan pengakuan bersama. Modal kultural adalah nilai-nilai yang bisa dipertukarkan yang merupakan akumulasi bentuk kultur yang berkembang dalam dunia sosial, misalnya kode-kode budaya, pengetahuan yang dimiliki, ijazah, kemampuan menulis, cara pembawaan, sopan santun dan sebagainya. Sedangkan modal simbolik menurut Bourdieu memiliki makna luas yaitu bentuk status atau pengakuan yang berwujud dalam bentuk obyektif atau institusi seperti gelar kiai, kesarjanaan, mobil mewah, kantor megah dan sebagainya.¹⁰

Kelas dalam pandangan Bourdieu adalah sejumlah agen yang memiliki posisi sama, berada dalam kondisi dan orang-orang yang terkondisikan sehingga memiliki perilaku dan selera yang sama. Ariel Heryanto menyatakan bahwa konsepsi kelas menengah Indonesia sebagai entitas disusun oleh berbagai kelas dari berbagai tata produksi yang

¹⁰ Haryatmoko, "Landasan Teoritis Gerakan Sosial menurut Bourdieu: Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa," dalam majalah BASIS no. 11-12 tahun ke-52, 2003, hal. 12

beragam di masyarakat.¹¹ Kelas menengah umumnya dianggap memiliki peran kritis sebagai simbol perubahan dalam masyarakat.

Civil Society menurut Saiful Mujani adalah modal sosial yang terdiri dari dua unsur, yaitu pertama, sikap saling percaya antar sesama warga (*interpersonal trust*) dan jaringan keterlibatan dalam kehidupan kewargaan (*civic engagement*).¹² Sementara Abdurrahman berpendapat bahwa *civil society* merujuk pada struktur dan dimensi kelembagaan masyarakat demokrasi dimana asosiasi kerelaan (*voluntary association*) mampu bekerja secara otonom di luar negara modern.¹³

Sedangkan Hendro Prasetyo berpendapat bahwa *civil society* bukanlah entitas sosial yang terdiri dari kumpulan manusia, ia merupakan ruang publik yang berisikan manusia sebagai individu-individu dengan segala atribut intrinsiknya.¹⁴ Oleh karenanya *civil society* memiliki karakteristik yang juga terdapat dalam konsep manusia sebagai individu. Jika individu merupakan ruang pribadi, *civil society* merupakan ruang publik. Karena itu menurutnya di dalam *civil society* juga harus terdapat kebebasan, kesederajatan dan nilai-nilai lain yang terkait seperti otonomi, kesukarelaan atau keseimbangan.

¹¹ Ariel Heryanto, 1993. "Memperjelas Sosok yang Samar" dalam Richard Tanter dan Kenneth Young (ed), *Politik Kelas Menengah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1993, hal. xiii

¹² Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: PT. Gramedia, 2007, hal. 117

¹³ Moeslim Abdurrahman, *Islam sebagai Kritik Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2003, hal. 29

¹⁴ Hendro Prasetyo dan Muhanif Ali, dkk, *Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal. 5

Civil society pada hakekatnya merupakan upaya untuk mensitesiskan kepentingan individual dan Negara dalam ruang publik yang dapat menjamin terpenuhinya kepentingan individu dan tertibnya kehidupan umum.¹⁵ Pengejawantahan civil society dalam kehidupan dapat terwujud dalam ruang publik yang sangat beragam seperti ekonomi, politik, budaya, pendidikan, pengetahuan, dan sebagainya. Perwujudan civil society dalam masyarakat dapat berupa asosiasi atau organisasi yang muncul secara sukarela, mandiri, rasional dan partisipatif baik dalam wacana maupun praksis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan.

Dalam masyarakat dan kehidupan bernegara, civil society dianggap selain sebagai kekuatan penyeimbang (*balancing force*) dari tindakan dominasi dan intervensi negara, ia juga dianggap sebagai kekuatan yang memiliki sikap kritis reflektif (*reflective force*). Oleh karenanya civil society dipandang sebagai sebuah prasyarat menuju kebebasan (*condition of liberty*), yaitu kebebasan dari (*freedom of*) segala dominasi dan hegemoni kekuasaan, dan kebebasan untuk (*freedom for*) berpartisipasi dalam berbagai proses kemasyarakatan secara sukarela dan rasional.

Upaya penciptaan kehidupan masyarakat yang demokratis harus dilakukan sendiri oleh masyarakat tanpa bergantung pada Negara. Masyarakat dapat melakukan penguatan dan pemberdayaan potensi-potensi

¹⁵ Ibid, hal.6

yang ada, sehingga dapat menjadi kekuatan civil society untuk menciptakan masyarakat yang demokratis.

Dalam hubungannya dengan Negara, civil society memiliki tiga fungsi pokok¹⁶, yaitu yang pertama, civil society merupakan pelindung masyarakat dari sikap Negara yang hegemonic, otoritarian dan represif. Kedua, civil society dapat menjadi mitra atau partner Negara dalam melaksanakan kepentingan publik. Dan ketiga, civil society dapat memainkan fungsinya untuk melengkapi dan mewedahi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama aktif dalam organisasi perempuan Nahdlatul Ulama yaitu Fatayat dan Muslimat yang dapat dikategorikan sebagai organisasi civil society. Dan peranan mereka memberi kontribusi yang besar bagi keberlangsungan organisasi. Peneliti tertarik untuk lebih memperdalam pengetahuan akan hal ini.

Keberadaan kelas menengah Nahdlatul Ulama, khususnya perempuan tidak bisa dipungkiri dan terbukti memberi nuansa dan warna bagi Nahdlatul Ulama. Keberadaan kelas sosial menengah Nahdlatul Ulama saat ini tersebar luas dalam berbagai struktur sosial masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Untuk memahami subyek suatu penelitian maka tidak cukup hanya melalui pengamatan tentang gambaran verbal tingkah laku informan saja, namun yang terpenting adalah pada pendalaman

¹⁶ Ibid, hal. 9

pandangan, pemikiran dan sikap mental yang tersembunyi di balik suatu tindakan verbal yang dilakukan aktor sosial. Dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami praktek sosial yang dilakukan perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama ini, maka pendekatan yang dibutuhkan adalah penelitian yang lebih bercorak kualitatif daripada kuantitatif. Menurut John W. Creswell suatu penelitian membutuhkan penggalan konstruk yang tidak tunggal.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif akan diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan dan fakta yang relevan dengan topik penelitian. Moleong (2001) berpendapat bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Penelitian kualitatif menekankan penggambaran atas suatu fenomena tertentu yang bertumpu pada prosedur-prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilakunya secara tertulis secara utuh (*holistic*).

Penelitian kualitatif lebih menekankan proses daripada produk sehingga dalam hal ini peneliti akan lebih banyak menggunakan pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” daripada “apa”. Pada penelitian ini membutuhkan kesungguhan dalam abstraksi dan interpretasi karena itu metode *verstehen* sangat diperlukan. Dalam melakukan *verstehen*,

seorang peneliti harus masuk dalam pikiran subyek penelitian. Waters (1994) mengemukakan bahwa penggunaan metode kualitatif melalui *verstehen* memiliki implikasi metodologi yaitu:

1. Menggali lebih dalam berbagai aspek dan informasi para pelaku serta memperhatikan dimensi struktural-kultural yang ada
2. Memanfaatkan semaksimal mungkin triangulasi data

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan beberapa pertimbangan mendasar, *pertama*, gejala yang diteliti adalah gejala sosial yang dinamis, yaitu peran aktor kelas menengah dalam penguatan civil society di Kabupaten Sidoarjo. Fenomena yang ingin diketahui adalah bagaimana kemampuan aktor atau informan dalam merumuskan dan menentukan tindakannya. *Kedua*, materi dalam penelitian ini adalah pemikiran dan aksi-aksi yang dilakukan perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama ini. Creswell menyatakan bahwa perhatian utama penelitian kualitatif adalah berkaitan dengan proses yang terjadi.

Dalam penelitian kualitatif peristiwa-peristiwa yang terjadi dicoba dipahami dan diberi makna melalui penafsiran baik dari informan maupun peneliti sendiri. Peneliti mempelajari gejala-gejala yang terjadi secara lebih intens sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

2. Penentuan Subyek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Sidoarjo adalah karena di wilayah ini organisasi Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama telah banyak berkiprah di masyarakat dan dinilai telah mampu berbuat banyak untuk masyarakat. Di wilayah Sidoarjo Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama telah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui peran-peran yang mereka lakukan. Telah banyak sumbangan dan kontribusi kedua organisasi ini kepada masyarakat.

Di bidang pendidikan, Muslimat Nahdlatul Ulama memiliki ratusan sekolah Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang kepengurusannya berada dibawah Muslimat Nahdlatul Ulama. Di bidang kesehatan, Muslimat Nahdlatul Ulama memiliki Rumah Sakit Siti Hajar yang juga kepengurusannya berada di bawah naungan Muslimat Nahdlatul Ulama.

Sedangkan subyek penelitian ini adalah perempuan muslim kelas menengah Nahdlatul Ulama berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh peneliti yaitu perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama yang memiliki peran di masyarakat. Subyek penelitian ini adalah aktivis perempuan Nahdlatul Ulama yang terdidik dan memiliki posisi strategis dalam organisasi Muslimat NU dan Fatayat NU dalam hal ini adalah para ketua umumnya, serta perempuan yang juga aktif dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Penentuan informan ini didasarkan atas kriteria yang berpijak pada konsep Bourdieu yakni bahwa yang dimaksud dengan perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama adalah mereka yang memiliki modal-modal seperti modal sosial, modal budaya dan modal kultural serta modal simbolik. Modal sosial merupakan jaringan hubungan sebagai sumber daya untuk menentukan kedudukan sosial. Para perempuan yang menjadi informan penelitian ini memiliki jaringan hubungan yang luas karena mereka merupakan pemimpin atau pengurus organisasi perempuan Nahdlatul Ulama, yaitu Fatayat dan Muslimat. Modal budaya adalah berupa ijazah, pengetahuan, kode budaya, cara berbicara, kemampuan menulis, cara pembawaan, cara bergaul yang berperan dalam penentuan kedudukan sosial.

Para perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki pendidikan minimal strata satu (S1), memiliki kemampuan berkomunikasi, pergaulan yang luas sebagai pengurus organisasi keagamaan terbesar. Sedangkan modal simbolik antara lain adalah simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, gelar, status sosial yang tinggi, barang berharga dan sebagainya. Para perempuan Nahdlatul Ulama tersebut memiliki jabatan yang bagus, gelar dan status sosial yang tinggi. Jika dilihat berdasarkan kriteria Bourdieu di atas, maka perempuan Nahdlatul Ulama yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat dikatakan sebagai perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama.

Subyek penelitian dipilih melalui *purposive sampling* dimana informan telah ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria tertentu dengan jumlah informan yang tidak dibatasi. Jumlah informan berapa pun dianggap cukup merepresentasikan suatu penelitian ketika data yang diperlukan sudah cukup.

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak tiga orang yang dianggap dapat mewakili lapisan perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Jumlah informan ini tentu tidak menggambarkan dan mewakili prosentasi jumlah perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama secara keseluruhan di Sidoarjo. Hal tersebut berdasarkan kaidah penelitian kualitatif dimana penentuan informan secara *purposive* tidak dibatasi secara kuantitatif, yang berarti bahwa ketika data yang diperoleh telah cukup menggambarkan latar penelitian yang diteliti maka jumlah informan yang ada telah dianggap mencukupi.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi kekuatan adalah caranya yang berasal dari kasus-kasus induktif, dengan fokus pada situasi yang khusus dengan penekanan pada makna yang ditafsirkan berdasarkan ungkapan-ungkapan informan, bukan pada jumlah orang yang menjadi subyek penelitian.

Tabel 1
Daftar Informan

No	Nama	Pendidikan	Jabatan dalam Organisasi Perempuan	Aktif pada Lembaga Swadaya Masyarakat
1.	Hj. FW (63 tahun)	S1	Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama	GOW
2.	Hj. SA (46 tahun)	S2	Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama	FKUB P2TP2A
3.	AT (46 tahun)	S1	Pengurus Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama	P2TP2A

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui:

1. Wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara dimaksudkan untuk menggali pendapat, persepsi, pengetahuan, pengalaman, dan penginderaan seseorang. Wawancara mendalam (*indepth interview*) yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara terstruktur, dengan menggunakan *interview guide* atau pedoman wawancara. Wawancara tidak terikat pada pedoman wawancara sehingga wawancara akan berlangsung secara bebas dan luwes tetapi tetap terkontrol dan terstruktur oleh pertanyaan sentral.
2. Dokumentasi. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara, maka peneliti akan melakukan studi dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti tulisan, dokumen, catatan-

catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya akan akan dijadikan tambahan peneliti untuk memperoleh data dalam proses penelitian.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam *indepth interview* mengenai pemikiran, persepsi atau pandangan yang didasarkan atas tindakan atau perilaku informan yang dikategorikan merepresentasikan golongan perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sidoarjo. Melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), peneliti berusaha tidak hanya melihat hanya pada apa yang terjadi di permukaan, tetapi juga apa yang ada di balik kesadaran informan. Agar hasil wawancara terdokumentasikan dengan baik, peneliti menggunakan alat bantu *tape recorder* lalu kemudian dilakukan transkripsi dan pemeriksaan hasil wawancara. Kemudian juga digunakan dokumentasi untuk melengkapi data yang diperlukan.

Data yang dihimpun peneliti adalah pengetahuan aktor atau informan dalam memaknai tindakan sosialnya. Gagasan, ide, harapan, keinginan, kepentingan digali peneliti untuk mengetahui bagaimana informan mengonstruksi dan menata tindakan sosialnya. Peneliti memfokuskan pada cara informan menginterpretasikan diri.

Untuk mendapatkan wawancara dan informasi peneliti mendatangi sejumlah tempat yang menjadi aktifitas informan seperti kediaman informan, tempat kerja informan, pondok pesantren dimana

informan menjadi Bu Nyai, dan kantor Muslimat Nahdlatul Ulama Sidoarjo.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data yang akan dilakukan bertujuan untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dan studi dokumentasi yang telah dilakukan. Proses penelaahan dan penyusunan dilakukan secara sistematis terhadap semua transkrip wawancara, dan bahan-bahan lain yang dihimpun untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai data, dan mengkomunikasikan apa yang telah ditemukan oleh peneliti di lapangan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif didasarkan pada upaya memahami peran perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama dalam penguatan civil society di masyarakat. dimensi kesadaran praktis, diskursif, motif informan baik yang disadari atau tidak, lingkungan kultural serta dimensi struktur sosial merupakan realitas yang dicoba diinterpretasikan peneliti.

Menurut Moloeng¹⁷, analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data oleh peneliti ke dalam pola, kategori dan satuan data sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Dalam penelitian kualitatif prinsip dasar yang menjadi pijakan adalah menemukan teori. Dalam melakukan penelitian

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001, hal. 103

ini, peneliti akan menggunakan analisis komparasi konsultan. Tahap-tahap kerja metode komparasi konstan meliputi :

1. Memperbandingkan kejadian yang cocok dengan kategorinya
2. Menginterpretasikan kategori dengan ciri-cirinya
3. Merumuskan teori
4. Menuliskan teori

Setelah peneliti memperoleh data melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis sedemikian rupa menurut kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku sehingga mampu dipertanggungjawabkan keabsahannya.

5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Tehnik yang digunakan untuk menguji kembali kebenaran data yang telah diperoleh atau dikumpulkan melalui interview, atau dokumentasi. Tehnik validasi data dilakukan melalui metode triangulasi yaitu dengan menggunakan sesuatu yang lain di luar dan sebagai perbandingan terhadap data yang telah masuk. Dalam pelaksanaannya, peneliti membandingkan informasi yang didapat dari sumber atau informasi di *cross check* dengan informasi lainnya. Perbandingan juga dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara satu informan dengan informan lainnya dan juga kemudian membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen.

C. Sistematika Pembahasan

- Bab I** Membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan
- Bab II** Membahas tentang kerangka teoritis penelitian ini mengenai Perempuan Kelas Menengah Nahdlatul Ulama dan Civil Society yaitu: Konsep Kelas Menengah, Perempuan Kelas Menengah Nahdlatul Ulama, Peranan Kelas Menengah, Civil Society dan Kelompok Muslim di Indonesia serta Lembaga Sosial Keagamaan Sebagai Wahana Pengembangan Civil Society
- Bab III** Membahas hasil temuan penelitian ini tentang bagaimana peran perempuan muslim kelas menengah Nahdlatul Ulama dalam masyarakat dan dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo
- Bab IV** Pembahasan tentang Analisa Hasil Temuan Penelitian yaitu mengenai Bagaimana Peran Perempuan Kelas Menengah Nahdlatul Ulama dalam Penguatan Civil Society di Kabupaten Sidoarjo
- Bab V** Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB II

PEREMPUAN KELAS MENENGAH NAHDLATUL ULAMA DAN CIVIL SOCIETY DALAM PERSPEKTIF TEORI

A. Konsep Kelas Menengah

Konsep kelas menengah yang ada selama ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah munculnya kelas di Eropa Barat, yang lahir dari tatanan sistem kapitalis di Eropa Barat pada saat itu. Analisis mengenai kelas menengah dalam bidang ilmu sosial selama ini mengacu pada tradisi pemikiran Karl Marx (1818-1883) dan Max Weber (1864-1920). Namun demikian konsep Marx tentang kelas sebagai alat analisis ilmu sosial telah dicoba disempurnakan oleh beberapa sosiolog.

Meskipun Marx menyadari bahwa akan ada kelas baru (kelas menengah), namun Marx tetap berpendapat bahwa pada akhirnya hanya ada dua kelas yang akan bertahan yaitu kelas borjuis (pemilik modal) dan proletar (buruh). Karl Marx¹⁸ menganggap aspek ekonomi dan privilese sebagai dasar pengelompokan sosial. Sejatinya Marx juga menyadari akan ada kelas yang tidak dapat begitu saja dimasukkan ke dalam kelas borjuis atau kelas proletar, dan kelas itu diidentifikasi sebagai kelas menengah. Kaum cendekiawan dan imam (elite agama) oleh Marx dimasukkan dalam

¹⁸ Karl Marx dan Friedrich Engels, *Selected Works*, Vol. 1 (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1950).

kelas menengah yang akan terbentuk dalam hubungan antar kelas-kelas tersebut.

Sedangkan Max Weber¹⁹ menjelaskan konsep kelas sebagai pengelompokan atau penggolongan semua orang yang berada di dalam situasi kelas yang sama. Situasi kelas diartikan sebagai probabilitas atau kemungkinan seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh barang, posisi dan kekuatan batin. Weber mengelompokkan masyarakat ke dalam tiga kelas yakni kelas pemilikan (*property classes*), kelas pedagang (*commercial classes*) dan kelas sosial (*sosial classes*). Weber mengasumsikan analisis konseptualnya berdasarkan kerangka tiga dimensi stratifikasi sosial, yakni dimensi privilese, prestise dan kekuasaan. Berdasarkan pembagian kelas menurut Weber ini muncul tiga variasi kelas, yaitu: kelas atas (*upper class*), kelas menengah (*middle class*) dan kelas bawah (*lower class*).

Weber berpendapat bahwa kelas menengah tidak hanya lahir berdasarkan latar sistem produksi, faktor lain seperti kualitas keagamaan yang dimiliki oleh kelompok keagamaan dianggap dapat menduduki kelas menengah yang diwakili melalui komunitas intelektual diantara mereka. Analisis Weber tentang kelas lebih ditekankan pada hak kepemilikan,

¹⁹ HH Gerth dan C. Wright Mills (eds), *From Max Weber: Essays in Sociology* New York: Oxford University Press, 1946

kesejahteraan dan kesempatan-kesempatan hidup daripada sebagai bentuk hubungan terhadap alat-alat produksi.

Pada tahapan selanjutnya konsep dan gagasan Marx dan Weber mengenai kelas sosial dicoba dikembangkan oleh beberapa sosiolog. Mac Iver menyatakan bahwa kelas sosial merupakan bagian dari sebuah komunitas yang membedakannya dari komunitas yang bukan kelas sosial, tidak hanya ditandai oleh batas-batas yang muncul dari bahasa, daerah, fungsi atau spesialisasi saja, namun terutama ditandai oleh status sosial. Sedangkan Croner menyatakan bahwa kelas sosial adalah kelompok sosial yang ditentukan oleh beberapa faktor yakni, kesamaan kondisi sosial, kesamaan status sosial dan kesamaan nilai-nilai sosial²⁰.

Seorang ahli ilmu sosial Pierre Bourdieu menjelaskan teorinya tentang kelas menengah secara berbeda dibandingkan dengan Marx dan Weber. Jika konsep kelas menurut Marx ditentukan semata-mata karena penguasaan atas modal atau faktor ekonomi, maka Bourdieu berpendapat bahwa konsep kelas tidak dapat dilepaskan dengan apa yang disebut dengan habitus dan ranah. Habitus dan ranah dalam perspektif Bourdieu tidak dapat dilepaskan dari konsep modal atau capital. Ada empat jenis capital menurut Bourdieu yaitu: ekonomi, sosial, kultural dan simbolik.

²⁰ Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa-Kritik*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986) hal. 91

Modal ekonomi memiliki posisi penting, namun modal sosial juga tak kalah penting menurut Bourdieu dalam hubungannya dengan konsep kelas menengah. Modal sosial adalah modal capital berupa kumpulan sumber daya baik actual maupun potensial yang terhubung dengan kepemilikan jaringan atau relasi yang telah terinstitusionalisasi dalam pemahaman dan pengakuan bersama. Modal kultural merupakan nilai-nilai yang bisa dipertukarkan yang merupakan akumulasi bentuk kultur yang berkembang dalam dunia sosial, contohnya adalah pendidikan, pengetahuan, kode budaya, charisma, cara pembawaan, sopan santun, kemampuan berbicara, kemampuan menulis, dan sebagainya. Sedangkan modal simbolik adalah bentuk status atau pengakuan yang dapat mewujudkan dalam bentuk obyektif maupun institusi, misalnya: gelar sarjana, kiai, mobil mahal, dan sebagainya.²¹

Perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama yang menjadi informan penelitian ini memang dapat dikatakan tidak memiliki modal ekonomi, namun mereka memiliki modal sosial, kultural dan simbolik sebagaimana yang dikatakan Bourdieu. Modal atau kapital menurut Bourdieu tidak hanya berupa ekonomi (materi), tetapi dapat pula berupa non materi seperti jaringan sosial, kultural dan simbolik. Meskipun para informan ini tidak memiliki modal materi, namun mereka memiliki jaringan

²¹ Haryatmoko, "Landasan Teoritis Gerakan Sosial menurut Bourdieu: Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa" dalam Majalah BASIS, No. 11-12, November-Desember 2003, hal. 11-12

sosial yang kuat, posisi sosial yang bagus di masyarakat, pendidikan yang tinggi serta pengakuan yang bagus dalam masyarakat.

Para perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki jaringan sosial melalui organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama atau Muslimat Nahdlatul Ulama. Para informan perempuan ini memiliki posisi sosial yang bagus di masyarakat sehubungan dengan aktifitas mereka dalam organisasi. Mereka juga memiliki pendidikan yang tinggi karena semua informan telah menempuh pendidikan minimal sarjana. Pengakuan yang baik dalam masyarakat juga mereka miliki berkat kiprah mereka dalam masyarakat, khususnya untuk kaum perempuan.

Kelas menurut Bourdieu dalam arti realitasnya bukanlah kelas secara nyata, namun merupakan konstruksi imajiner dimana agen menunjukkan perjuangan untuk mendapatkan kedudukan atau posisi yang lebih baik. Kelas dalam konstruksi Bourdieu adalah sejumlah agen yang memiliki posisi sama, berada dalam kondisi dan orang-orang dalam kondisi memiliki perilaku dan selera yang sama.

Para perempuan Nahdlatul Ulama tersebut berdasarkan pandangan Bourdieu termasuk dalam golongan kelas menengah sebagaimana pandangan Hefner yang menyatakan bahwa dalam masyarakat muslim melalui proses dialektika sosial, pendidikan, politik, dan budaya antara sekelompok kalangan tertentu dengan mayoritas masyarakat dalam

kehidupan sehari-hari akan menghasilkan entitas lapisan sosial kelas menengah.²²

Kelas menengah Nahdlatul Ulama berdasarkan sejarahnya telah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia. Menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur)²³ keberadaan kelas menengah Nahdlatul Ulama dapat dilacak dan ditemukan dalam berbagai lapisan masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Pada struktur masyarakat pedesaan, warga Nahdlatul Ulama pada umumnya secara ekonomi merupakan masyarakat kaya baik sebagai petani maupun pedagang. Di daerah perkotaan, kelas menengah Nahdlatul Ulama banyak dijumpai dan umumnya memiliki profesi sebagai pengusaha dan pengrajin. Jika dibandingkan dengan konsep kelas menengah barat, kelas menengah Nahdlatul Ulama ini menurut Gus Dur terletak pada sikap independensi dan respon kritisnya terhadap penguasa. Gus Dur berpendapat bahwa kelas menengah Nahdlatul Ulama memiliki perbedaan dengan kelas menengah keturunan Cina yang dilahirkan oleh penguasa.

B. Perempuan Kelas Menengah Nahdlatul Ulama

Para ahli ilmu sosial berpendapat bahwa kelas menengah memainkan peranan dalam proses perubahan dalam suatu Negara. Kelas menengah merupakan salah satu penyokong perubahan dalam suatu Negara.

²² Robert W. Hefner, *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001. Hal. 49.

²³ Abdurrahman Wahid, "Kelas Menengah Islam di Indonesia", dalam Richard Tanter dan Kenneth Young, *Politik Kelas Menengah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, hal. 19-22.

Kelas menengah dianggap penting dan dijadikan fokus istimewa modernisasi sosial dalam skala global karena akan memainkan peran yang lebih intensif dan penting di masa yang akan datang baik sebagai pembuat kebijakan maupun sebagai konsumen dalam pembangunan.²⁴

Di Indonesia, menurut para ahli diantaranya Daniel S. Lev menyatakan bahwa kelas menengahnya memiliki modal non materi seperti modal sosial, modal budaya, modal simbolik, asset organisasi, dan sebagainya. Lev berpendapat bahwa basis kekuasaan kelas menengah Indonesia tidak berada di area korporasi kapitalis Negara karena mereka tidak memiliki otoritas yang bisa mengendalikan kepemilikan dan alat produksi. Mereka memiliki basis sosial seperti asset organisasi sebagaimana para perempuan Nahdlatul Ulama tersebut. Para perempuan Nahdlatul Ulama tersebut memiliki modal sosial, modal budaya, modal simbolik seperti posisi mereka dalam organisasi, pengakuan dari masyarakat, kewibawaan, charisma dan sebagainya.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dan juga Jawa Timur memiliki andil besar dalam mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat Jawa Timur umumnya dan Kabupaten Sidoarjo khususnya. Dengan jumlah besar anggotanya Nahdlatul Ulama juga memiliki jumlah anggota perempuan yang banyak. Sebagian dari para

²⁴ Helmuth Lange dan Lars Meier (eds). *The New Middle Classes: Globalizing Lifestyles, Consumerism and Environmental Concern*, 2009. Germany: Springer

perempuan Nahdlatul Ulama ini dengan modal yang dimilikinya serta mobilitasnya selama ini dapat dikatakan sebagai perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama.

Sebagai organisasi masyarakat dan sebagai institusi organisasi, Nahdlatul Ulama memiliki struktur kepengurusan dari tingkat atas hingga tingkat bawah. Nahdlatul Ulama memiliki struktur kepengurusan berjenjang yang efektif mulai tingkat nasional, propinsi, kabupaten, kecamatan hingga ke desa-desa. Di tingkat nasional Nahdlatul Ulama memiliki kepengurusan yang disebut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), tingkat provinsi yang disebut Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), tingkat kabupaten disebut Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), di tingkat kecamatan disebut Majelis Wakil Anak cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) dan tingkat desa yang disebut Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU). Sedangkan para anggota perempuan Nahdlatul Ulama memiliki wadah organisasi yang dinamakan Muslimat Nahdlatul Ulama dan Fatayat Nahdlatul Ulama.

Di samping sebagai organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat yang berkiprah dalam bidang keagamaan, Nahdlatul Ulama juga mendorong anggota perempuannya untuk berorganisasi dan berkiprah dalam masyarakat melalui wadah Muslimat Nahdlatul Ulama yang lahir pada tahun 1946 dan juga Fatayat Nahdlatul Ulama yang lahir tahun 1950. Kedua organisasi ini memiliki kepengurusan yang menyebar hampir di seluruh

Indonesia baik di pedesaan maupun di perkotaan dengan struktur kepengurusan yang berjenjang mulai dari tingkat nasional, propinsi, kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa sebagaimana organisasi induknya yaitu Nahdlatul Ulama.

Keberadaan sayap organisasi Nahdlatul Ulama yang mewadahi anggota perempuannya tersebut diharapkan dapat mewakili Nahdlatul Ulama dan bahkan Negara dalam menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi kaum perempuan. Organisasi Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama tidak hanya terbatas membahas dan menjawab berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi kaum perempuan, tetapi juga berupaya mengantisipasi persoalan anggotanya dan memberdayakan para anggotanya.

Masing-masing struktur organisasi di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama tersebut memiliki peran yang besar dan signifikan dalam masyarakat dan membawa warna tersendiri dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam struktur organisasi tersebut masing-masing anggota memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya melalui wadah, jaringan dan media yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama.

Perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama dalam penelitian ini adalah para perempuan dari kalangan Nahdliyin yang menurut Bourdieu memiliki modal, baik berupa modal sosial maupun simbolik seperti pendidikan, kekuasaan, jaringan (*link*), ekonomi dan sebagainya. Bourdieu menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai kelompok kelas

menengah apabila menguasai kepemilikan terhadap empat modal, yakni modal (1) Kapital, (2) Sosial (3) Simbolik dan (4) Kultural. Dengan modal ini seseorang memungkinkan untuk dapat mengakses informasi, koneksi, peluang kekuasaan hingga peluang bisnis.

Para informan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai perempuan kelas menengah karena memiliki ciri-ciri yang menunjukkan sebagai kategori tersebut, antara lain memiliki modal sosial berupa kedudukan atau legitimasi dalam organisasi, tingkat pendidikan yang memadai (*well educated*). Seluruh informan dalam penelitian ini memiliki pendidikan minimal S1 dan juga memiliki posisi atau kedudukan yang signifikan dalam organisasi.

C. Peran Kelas Menengah Nahdlatul Ulama

Peran penting kelompok kelas menengah menurut Richard Tanter dan Kenneth Young²⁵ salah satunya adalah sebagai simbol perubahan sosial dalam struktur masyarakat Barat feodal dan kapitalis berubah menjadi sistem kehidupan yang demokratis. Peran kelas menengah di Indonesia berdasarkan sejarahnya banyak menimbulkan perdebatan, dan dalam tubuh Nahdlatul Ulama sendiri kemunculan kelas menengah Nahdlatul Ulama telah memberi nuansa dan warna bagi Nahdlatul Ulama.

²⁵ Richard Tanter dan Kenneth Young, *Politik Kelas Menengah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1993

Alagappa²⁶ berpendapat bahwa civil society di Asia, dengan pertumbuhan jumlah mereka yang besar di beberapa Negara telah menjadi kekuatan substansial dan penting dalam suatu Negara. Dengan watak dan kekuatan organisasi serta hubungannya dengan Negara dan masyarakat mengalami variasi luas di beberapa negeri. Peran mereka menurut Alagappa dalam proses politik juga kompleks dan membawa perubahan yang sangat signifikan.

Tocqueville berpendapat bahwa civil society beroperasi dalam kondisi-kondisi kesetaraan sosioekonomi dan kebebasan politik, tercipta melalui hubungan sukarela yang bekerjasama untuk tujuan bersama. Yang menjadi motivator dalam menggerakkan asosiasi bukanlah represi melainkan kemauan bersama secara sukarela. Ada pandangan bahwa partisipasi dalam beberapa asosiasi dapat memproduksi modal sosial yang penting bagi terwujudnya demokrasi yang sehat. Civil society yang kuat merupakan prasyarat bagi demokrasi yang efektif.

Kelas menengah memiliki peranan dalam menentukan keberlanjutan berbagai organisasi massa di Indonesia, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Sejak awal pendiriannya, Nahdlatul Ulama didirikan oleh kelas menengahnya (sebagian besar terdiri dari kiai). Kelas menengah Nahdlatul

²⁶ Muthiah Alagappa, *Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space*, California: Stanford University Press, 2004

Ulama sudah muncul sejak awal pembentukannya dan terus mengiringinya hingga berdirinya Nahdlatul Ulama dan menjalankan roda organisasinya.

Menurut Alagappa²⁷, keberadaan civil society telah berhasil mengembangkan peran aktivitas organisasi civil society untuk mendukung, menuntut atau mencegah perubahan politik dalam mengembangkan agenda reformasi dan penguatan sosial, membantu Negara memberikan pelayanan, dan memformulasikan serta mengimplementasikan program mereka sendiri.

Kelompok civil society di Asia menurut Alagappa memiliki fungsi jangkauan yang luas meliputi budaya, agama, pengembangan komunitas, kesejahteraan sosial, olahraga dan hiburan, bahasa dan pendidikan, pengobatan dan kesehatan publik, buruh, bisnis, perlindungan konsumen, pertanian, lingkungan, pengembangan ekonomi, reformasi sosial, hak-hak minoritas dan manusia, media, keadilan ekonomi, politik, urusan luar negeri dan keamanan.

Dalam struktur sosial Nahdlatul Ulama, adanya kelompok kelas menengah ini telah berkembang sedemikian rupa. Adanya mobilitas pendidikan, politik dan ekonomi telah membawa melahirkan kelas menengah Nahdlatul Ulama sebagaimana juga dalam berbagai elemen masyarakat lainnya. Keberadaan kelas menengah Nahdlatul Ulama telah menyebar hingga ke berbagai struktur sosial masyarakat saat ini.

²⁷ *ibid*

Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama memiliki potensi sumber daya yang tidak terbatas pada dunia pesantren saja. Munculnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga banyak diisi dan diinisiasi oleh berbagai kalangan yang tergabung dalam keanggotaan Nahdlatul Ulama seperti kalangan muda, perempuan, intelektual, dan sebagainya. Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan wadah bagi budaya berpikir kritis berbagai kalangan Nahdlatul Ulama. Melalui Lembaga Swadaya Masyarakat tidak sedikit anak muda Nahdlatul Ulama yang berhasil berkiprah dan berperan dalam masyarakat. Hampir di setiap kabupaten di Jawa Timur terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat yang banyak diikuti oleh kalangan Nahdlatul Ulama, khususnya anak muda dan perempuan Nahdlatul Ulama.

D. Civil Society dan Kelompok Muslim Di Indonesia

Gagasan dan praktek penguatan civil society merupakan salah satu alternative model perjuangan menuju demokratisasi dalam suatu negara. Penguatan civil society merupakan agenda yang sangat penting dalam usaha membangun demokratisasi di Indonesia. Civil society sebagaimana yang dicetuskan oleh pelopornya memiliki tiga ciri utama. Pertama, adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, terutama ketika berhadapan dengan Negara. Kedua, adanya ruang publik bebas (*the free publik sphere*) sebagai sarana keterlibatan politik warga Negara secara aktif melalui wacana dan praksis

yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ketiga, adanya kemampuan untuk membatasi kekuasaan Negara untuk mengintervensi.

Civil Society menurut Alagappa²⁸ adalah ruang publik diantara Negara, masyarakat dan kehidupan privat dimana beberapa individu berusaha membangun keterlibatan masyarakat kolektif yang otonom pada tingkatan yang berbeda-beda seputar isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan publik. Civil society menurut Alagappa adalah konsep yang tidak memiliki pengertian tunggal. Keberadaan civil society juga akan memainkan peranan penting dalam membela dan mengawal kepentingan masyarakat ketika berhadapan dengan kekuatan Negara dan hegemoni pasar dalam sistem kapitalistik. Yang terpenting, civil society berperan utama dalam memformulasikan cita-cita demokrasi untuk mempengaruhi Negara.

Sedangkan Alexis de Tocqueville (1805-1859) mendefinisikan civil society sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan dan keswadayaan, kemandirian tinggi berhadapan dengan Negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

Tatanan civil society dapat ditemukan pada asosiasi, yaitu sekelompok individu dalam masyarakat yang meyakini satu doktrin atau kepentingan tertentu dan memutuskan untuk merealisasikan doktrin atau

²⁸ Muthiah Alagappa, *Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space*, California: Stanford University Press, 2004

kepentingan tertentu dan memutuskan doktrin atau kepentingan bersama tersebut. Keberadaan asosiasi, organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan ruang atau wilayah yang dimiliki masyarakat yang menurut Tocqueville bebas dari campur tangan Negara. Asosiasi tersebut membawa individu-individu keluar dari batas-batas kehidupan pribadi menuju proyek sosial yang korelatif dengan ide partisipasi dalam sistem demokrasi. Ia berpendapat bahwa etika liberalism bersamaan dengan semangat revolusioner dapat diakhiri dengan memantapkan dan mengkonstitusionalisasikan kebebasan lewat pembentukan lembaga-lembaga politik.

Asosiasi yang dibentuk oleh masyarakat menurut Tocqueville adalah lembaga perantara yang akan memainkan peran sebagai sebuah jawaban hancurnya rezim komunis dan otoritarianisme kapitalisme yang keduanya dianggap tidak mampu memberikan tatanan yang membebaskan dan mengalami krisis. Tocqueville berpendapat bahwa civil society akan menjadi kekuatan penyeimbang, ia akan melindungi individu dari Negara dan pasar. Tatanan civil society merupakan bagian dari demokrasi yang ingin melahirkan hak-hak warga Negara dan menjamin terbukanya partisipasi secara terbuka.

Bagi Tocquville civil society di Negara-negara Asia tidak dapat dipahami secara tunggal, di Asia civil society tidaklah bersifat statis. Pertumbuhan civil society di Asia telah menjadi arena kekuatan, perjuangan

dan kerjasama di antara organisasi-organisasi civil society. Fungsi utama civil society adalah fungsi menghadapi kehidupan sosial yang tidak dijumpai dalam pemerintah pusat yang lemah. Fungsi selanjutnya adalah melakukan intermediasi diantara kepentingan personal atau lokal dengan kepentingan masyarakat nasional, mencegah tirani mayoritas, membatasi kekuasaan Negara dan mencegah terjadinya penyimpangan oleh Negara.

Menurut Nakamura²⁹ akar keberadaan civil society di Indonesia telah ada sejak jaman penjajahan yang muncul dalam berbagai organisasi dan asosiasi yang bersifat sukarela. Meskipun organisasi yang bersifat *voluntary* tersebut mendapat banyak tekanan dari pemerintah colonial, namun mereka tetap mampu menjaga jarak dari intervensi pemerintah colonial. Contoh organisasi Islam yang paling terkenal dan termasuk dalam golongan ini adalah organisasi Muhammadiyah yang didirikan tahun 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan tahun 1926 oleh KH. Hasyim Asy'ari. Terdapat pula berbagai organisasi Muslim lain yang bergerak di tingkat propinsi dan lokal di seluruh penjuru negeri ini.

Mengingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah kaum Muslim, maka tidak berlebihan jika orang-orang Muslim memainkan peranan positif dalam penguatan civil society dan demokrasi di Indonesia,

²⁹ Mitsuo Nakamura, *Islam and Civil Society in Southeast Asia*, Singapore: Singapore University Press, 2001. Hal. 13

demikian pula harapan banyak masyarakat akan keberadaan kaum muslim untuk memberi kontribusi yang positif bagi masyarakat. Beberapa ahli sosial banyak menuliskan sikap skeptisnya akan relevansi peran masyarakat Islam terhadap keadaban (*civility*) dan demokrasi. Mereka mempertanyakan apakah pertumbuhan civil society di kalangan umat muslim dapat memberi ruang dan kondusif bagi terjadinya proses demokratisasi. Huntington³⁰ pernah menyatakan bahwa Islam tidaklah memberikan jalan bagi proses demokratisasi, tidak ada kompatibilitas dan kesesuaian antara Islam dengan demokrasi.

Jika melihat dari komposisi penduduk Indonesia yang mayoritas umat Muslim, maka sebenarnya umat Islam memiliki peran yang signifikan bagi penguatan civil society di Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dari peran masyarakat Islam yang terlibat aktif dalam berbagai organisasi dan asosiasi voluntaristik keagamaan maupun non keagamaan yang bersifat inklusif seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan, partai politik dan lain sebagainya.

E. Lembaga Sosial Keagamaan Wahana Pengembangan Civil Society

Civil Society di Asia menurut Alagappa³¹ memiliki variasi yang sangat beragam dalam hal komposisi, sumber daya, dan tujuannya. Mereka berbeda-beda pada setiap masa. Organisasi *civil society* eksis hampir berada

³⁰ P. Samuel Huntington, *The Clash of Civilization and The Remaking of World Order*, New York: Touchstone, 1997

³¹ *ibid*

di semua segi kehidupan, pekerjaan dan pemerintahan. Orientasi politik mereka menjangkau spektrum yang luas. Terdapat variasi pula dalam hal ukuran dan kapasitas mereka.

Organisasi civil society seringkali memiliki fondasi komunal, keagamaan atau ideologis dan visi organisasi tertentu sangat tidak sesuai dengan ruang yang tidak mengenal kompromi. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Indonesia dengan keanggotaan yang luas merupakan contoh organisasi civil society. Organisasi civil society adalah para aktor sosial yang aktif dalam proses membangun Negara dan juga dalam membangun sistem pemerintahan.

Lembaga atau organisasi sosial keagamaan di Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan civil society. Taufik Abdullah menyatakan bahwa sejarah organisasi atau lembaga sosial keagamaan erat kaitannya dengan pembentukan civic kultur umat muslim di Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, lembaga atau organisasi sosial keagamaan yang ada di Indonesia muncul pada masa pergerakan kemerdekaan melawan penjajahan Belanda. Tidak sedikit lembaga sosial keagamaan yang secara substansial telah menjalankan fungsinya sebagai civil society. Suatu organisasi jika ia tidak memberikan kesadaran politik dan tidak memberikan kesadaran tentang hak-hak dasar yang bersifat asasi maka ia dianggap bukan merupakan civil society³².

³² Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, hal. 135-137.

Organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain sebagainya yang membangun civility para anggotanya juga merupakan civil society, meskipun tidak secara otomatis dapat disebut sebagai organisasi civil society jika kita berbicara mengenai organisasi sosial keagamaan.

Organisasi civil society meskipun terdapat variasi substansial dan temporal di beberapa Negara, menurut Alagappa³³ berada dalam garis terdepan dalam mendorong transisi menuju demokrasi. Mereka menjadi kekuatan yang dapat memperkuat pemerintah atau justru menjadi kekuatan untuk melawan pemerintah. Ia bisa menjadi kekuatan penyeimbang dalam suatu Negara.

Organisasi civil society menurut Alagappa³⁴ memainkan peran terdepan dalam menyebarkan dan memperdalam demokrasi di beberapa Negara yang mengalami transisi demokrasi serta Negara yang relative lama menerapkan demokrasi. Peran-peran yang dilakukan tersebut beragam mulai dari menyuarakan kepentingan komunitas yang termarginalkan, mendorong pendidikan dan sosialisasi demokrasi, memperluas jangkauan isu-isu pokok tentang pemerintahan demokratis, partisipasi dalam pemerintah baik dalam level nasional maupun lokal, restrukturisasi dan pengawasan lembaga Negara, mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat dari pemerintah dan pemimpin politik, mendorong dan mempromosikan keadilan transisional, mengawasi pemilu, mendidik pengembangan,

³³ ibid

³⁴ ibid

pemimpin politik baru, dan menyokong kekuatan demokratis untuk mencegah perlawanan terhadap demokrasi.

Jika dilihat berdasarkan fungsinya sebagai penyeimbang atau pelindung dari sikap hegemonic dan otoritarian Negara, maka organisasi Nahdlatul Ulama pada era Abdurrahman Wahid telah melakukan kritik-kritik terhadap pemerintah. Melalui kritik-kritiknya terhadap pemerintahan Orde Baru dan nilai-nilai demokrasi yang tengah diperjuangkan, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak hanya meletakkan organisasi Nahdlatul Ulama sebagai oposan pemerintah, namun lebih dari itu organisasi ini juga melahirkan generasi muda Nahdlatul Ulama yang kritis terhadap pemerintah. Dan hal ini merupakan kondisi yang memungkinkan terwujudnya civil society di organisasi Nahdlatul Ulama.

Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sejatinya memiliki potensi yang besar dalam membangun civil society di Indonesia dibandingkan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang lain. Dengan jumlah anggotanya yang besar yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia beserta peran serta aktif pengurusnya maka bukan tidak mungkin Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah mewujudkan keberadaannya sebagai organisasi civil society. Berdasarkan sejarahnya, sejak tahun 1990-an, Nahdlatul Ulama telah melakukan pendidikan demokrasi pada para kiai, santri, masyarakat meskipun kadangkala harus berhadapan dengan masalah teologis, kultur politik dan faktor-faktor lain.

Pada bagian lain, menurut Alagappa³⁵ meskipun merupakan organisasi yang bersifat *bottom up, civil society* terkadang terdorong untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dan intim dengan pemerintah serta institusi partai. Kadangkala terjadi penetrasi organisasi sosial oleh Negara atau partai serta munculnya praktik *double posting*, yaitu mengangkat kader pemerintah atau partai untuk bergabung sebagai pengurus organisasi sosial tersebut.

Dr. Nohdlatul Ulama adalah seorang dengan tingkat pendidikan yang memadai yaitu tingkat sarjana (S1) hingga tingkat magister (S2) dan wanita yang aktif dalam organisasi perempuan dalam wadah organisasi Nahdlatul Ulama dalam hal adalah Fesyot dan Muslimat. Sudah terungkap informasi dalam penelitian ini adalah seorang Bu Nyak yang memiliki profesi penatun dan banyak mengisi rumah dan pengajian.

Penggunaan kelas menengah Nahdlatul Ulama banyak berperan dalam berbagai bidang kehidupan seperti di bidang sosial, politik, dan kesehatan. Memiliki peran dalam masyarakat dan berbagai dalam masyarakat membuat para perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama ini merupakan hal yang wajar dan memang sudah menjadi ukuran pada jaman sekarang ini sebagaimana yang dikemukakan FW (60 tahun) yang juga menjadi ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo dan juga seorang Bu Nyak.

"Penggunaan di jaman sekarang ini memang harus punya peranan dalam masyarakat, tidak seperti jaman dulu. Jaman sekarang ini sudah-sudah perempuannya banyak yang sudah beres-tesis tinggi, tidak seperti dulu yang

³⁵ *ibid*

BAB III

PERAN PEREMPUAN KELAS MENENGAH

NAHDLATUL ULAMA DALAM MASYARAKAT

A. Perempuan Kelas Menengah Nahdlatul Ulama dan Peranannya

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama adalah mereka dengan tingkat pendidikan yang memadai yaitu tingkat sarjana (S1) hingga tingkat magister (S2) dan mereka yang aktif dalam organisasi perempuan dalam wadah organisasi Nahdlatul Ulama dalam hal adalah Fatayat dan Muslimat. Salah seorang informan dalam penelitian ini adalah seorang Bu Nyai yang memiliki pondok pesantren dan banyak mengisi ceramah dan pengajian.

Perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama banyak berperan dalam berbagai bidang kehidupan seperti di bidang sosial, politik, dan keagamaan. Memiliki peran dalam masyarakat dan berkiprah dalam masyarakat menurut para perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama ini merupakan hal yang wajar dan memang sudah menjadi tuntutan pada jaman sekarang ini sebagaimana yang dikemukakan FW (60 tahun) yang juga menjadi ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo dan juga seorang Bu Nyai:

“Perempuan di jaman sekarang ini memang harus punya peranan dalam masyarakat, tidak seperti jaman dulu. Jaman sekarang ini anak-anak perempuannya banyak yang sudah bersekolah tinggi, tidak seperti dulu yang

sekolahnya rendah, malah jaman dulu perempuannya ada yang tidak bersekolah. Kalau jaman sekarang anak-anak tidak bersekolah ya akan ketinggalan. Sekarang para anak perempuan setelah kuliah tidak ada yang diam di rumah, mereka semua berkiprah. Karena itu mestinya para perempuan jaman sekarang harus punya peranan dalam masyarakat agar bermanfaat.”

Menjadi perempuan di jaman sekarang ini menurut para informan haruslah memiliki peran dan bermanfaat bagi masyarakat. Disamping karena perempuan saat ini telah memiliki kesempatan berkembang yang luas, mereka juga telah mendapatkan pendidikan yang memadai dibandingkan perempuan jaman dulu dimana kesempatan untuk berkembang terbatas serta memiliki pendidikan yang rendah.

Sebagai perempuan yang memiliki kesadaran serta memiliki banyak modal seperti ekonomi, sosial, simbolik dan budaya sebagaimana yang dikategorikan Bourdieu, maka perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama ini juga berupaya untuk memberikan pendidikan, kesempatan yang luas bagi anak perempuan mereka. Salah seorang informan (FW) menyatakan bahwa dua diantara empat keturunannya adalah perempuan. Dan ia memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk putri-putrinya tersebut:

“Saya punya empat anak, tiga diantaranya perempuan. Mereka semuanya saya sekolahkan tinggi (kuliah). Sekarang tiga anak saya

yang perempuan mengikuti jejak orang tuanya mendidik santri dan mengajar di kampus dan sekolah.”

Para perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama, terutama yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki peran yang cukup penting dalam masyarakat yang terwadahi dalam organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama dan Fatayat Nahdlatul Ulama. Peran-peran itu cukup banyak dan luas antara lain terwujud dalam bidang hukum, politik dan advokasi; bidang kesehatan; bidang sosial dan ekonomi, bidang pendidikan, serta bidang penerangan dan dakwah.

B. Peran di Bidang Hukum, Politik dan Advokasi

Di bidang hukum, politik dan advokasi, para perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama melalui organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama dan Muslimat Nahdlatul Ulama bekerjasama dengan berbagai instansi seperti BKBPMMP Pemkab Sidoarjo dan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo melakukan kegiatan antara lain: Memberikan respon aktif terhadap informasi yang berkembang di masyarakat melalui upaya: Mengadakan sosialisasi mengenai Undang-undang Pilpres, mengadakan sosialisasi Undang-undang Pemilukada, mengadakan seminar tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan trafficking, mengadakan sosialisasi tentang Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan trafficking, mengadakan dialog interaktif dan testimony mencegah kejahatan trafficking dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kegiatan lain yang dilakukan adalah memberikan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan melakukan pelatihan advokasi. Kegiatan ini dilakukan oleh perempuan Fatayat Nahdlatul Ulama dan Muslimat Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam LSM pemberdayaan perempuan dan anak.

Peran lain yang dilakukan adalah dengan melakukan gerakan penyadaran hukum dan pendidikan politik masyarakat, khususnya kaum perempuan melalui workshop pemberdayaan politik perempuan dan seminar tentang pendidikan politik di masyarakat.

Dilakukan juga kajian kritis terhadap berbagai kebijakan hukum dan politik yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan, yaitu mengadakan seminar tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai legalitas anak di luar nikah dan mengadakan seminar pendidikan politik bagi perempuan. Di samping itu para perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama ini juga berupaya untuk mengembangkan jaringan dengan lembaga atau instansi yang peduli dan terlibat dalam isu-isu perempuan.

Yang menjadi target dalam kiprahnya di bidang politik ini adalah agar kaum perempuan mengerti tentang masalah politik dan menyadarkan kaum perempuan bahwa ketika memilih seorang pemimpin atau wakil rakyat di dewan yang harus diperhatikan adalah kualitas individu dan tidak tertarik dengan adanya politik uang. Penekanannya adalah bahwa seseorang pemimpin ditentukan oleh kualitas individunya dan bukan oleh

uang yang dimilikinya. Hal tersebut dinyatakan oleh SA (46 tahun), ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo:

“Peran yang kami lakukan untuk masyarakat di bidang politik antara lain melaksanakan pendidikan politik untuk masyarakat. Banyak kegiatan yang telah kami lakukan antara lain *workshop*, seminar dengan menghadirkan banyak narasumber baik dari pusat maupun daerah. Targetnya adalah agar masyarakat mengerti tentang politik dan menyadarkan masyarakat bahwa ketika memilih pemimpin itu yang penting adalah kualitasnya dan bukan uangnya.”

Para perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama yang berada di bawah naungan organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama dan Muslimat Nahdlatul Ulama ini juga memiliki peranan yang besar dalam upaya memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Contohnya adalah mereka bersama elemen masyarakat lain dari berbagai organisasi seperti Nasiyatul Aisiyah, Gerakan Pemuda Anshor, Muslimat Nahdlatul Ulama ikut memperjuangkan berdirinya lembaga balai diklat untuk masyarakat di daerah Tulangan Sidoarjo. Setelah 3 tahun terkatung-katung karena tidak ada kesepakatan dan persetujuan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo untuk pembangunannya, maka perempuan anggota pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama ini berjuang lewat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sehingga gedung

balai diklat berhasil dibangun. Hal tersebut disampaikan Ibu SA (46 tahun), ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Sidoarjo:

“Kita perempuan yang ada di fatayat juga sangat peduli terhadap kepentingan masyarakat. Misalnya ketika ada program pemerintah pusat yang digulirkan untuk pemerintah daerah tentang pembangunan balai diklat, maka ketika program itu terkatung-katung selama tiga tahun karena ada tarik ulur di DPRD Sidoarjo, maka fatayat ikut berperan mendorong dewan untuk menyetujui pendirian Balai Diklat tersebut. Karena dengan berdirinya balai diklat tersebut dapat memberi manfaat bagi masyarakat, misalnya dapat digunakan untuk pelatihan anak-anak SMA. Fatayat ikut berjuang dengan bersama-sama organisasi lain datang ke kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk menekan anggota dewan melalui media, sehingga akhirnya ada kejelasan dengan disetujuinya pembangunan balai diklat.”

Secara umum, tujuan di bidang hukum, politik dan advokasi yang ingin dicapai oleh perempuan yang tergabung dalam Fatayat Nahdlatul Ulama ini antara lain adalah: ingin menegakkan supremasi hukum, memberikan penguatan hak perempuan dan kebutuhan dasar bagi kehidupan serta memberikan pemberdayaan hukum dan penegakan keadilan. Adapun cara yang dilakukan antara lain adalah melalui program-program: melakukan kajian kritis terhadap berbagai kebijakan hukum dan

politik yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan, melakukan gerakan penyadaran hukum dan politik di masyarakat, mengembangkan jaringan dengan lembaga atau instansi yang peduli dengan isu-isu perempuan, serta melakukan pemberdayaan perempuan dengan berbagai program seperti pendidikan politik untuk perempuan, peningkatan pendapatan keluarga dengan melibatkan perempuan.

C. Peran di Bidang Sosial dan Ekonomi

Di bidang sosial dan ekonomi, para perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama ini telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan mengembangkan koperasi Al Wardah yang lingkungannya mencakup Kabupaten Sidoarjo dengan kegiatan antara lain simpan pinjam, RAT Koperasi dan pengadaan bahan kebutuhan sehari-hari serta atribut organisasi. Kegiatan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Sidoarjo.

Juga telah dilakukan upaya pengembangan kelompok usaha berbasis kemasyarakatan dengan cara memfasilitasi kelompok usaha perempuan dalam asosiasi Pengurus Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama dan mengadakan gelar produk hasil kreatifitas dan hasil usaha anggota Fatayat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan tersebut dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dikopin Kabupaten Sidoarjo.

Upaya untuk mengakses pemanfaatan fasilitas ekonomi yang tersedia di pemerintah maupun swasta untuk keluarga tidak mampu juga telah dilakukan para perempuan ini melalui organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama, dengan memberi pelatihan-pelatihan kepada masyarakat terutama kaum perempuan. Pelatihan tersebut antara lain: pelatihan membuat sulam pita, pelatihan kewirausahaan (membuat kue-kue kering), pelatihan membuat kerupuk ikan, pelatihan potong rambut, pelatihan rias wajah, pelatihan membuat makanan dan minuman yang bernilai jual, pelatihan bisnis *online*. Kegiatan lain adalah mengadakan sarasehan kewirausahaan membuat kue kering. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan agar kaum perempuan di desa dan kota memiliki kemampuan berwirausaha sehingga mampu membantu perekonomian keluarganya.

Sedangkan para perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama dalam perannya di bidang ekonomi telah banyak upaya yang dilakukan, antara lain: menerima dan memasarkan hasil produksi anggota Muslimat Nahdlatul Ulama, mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan penguatan modal usaha, pelatihan manajemen organisasi, administrasi dan koperasi. Kesemua pelatihan ini ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas usaha perempuan anggota Muslimat Nahdlatul Ulama.

Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan di bawah organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama adalah membangun kerja sama dengan kalangan profesional untuk

membangun jaringan informasi dan distribusi hasil produk usaha perempuan yang menjadi anggota Muslimat Nahdlatul Ulama.

Upaya mengadakan pelatihan-pelatihan oleh kader Fatayat Nahdlatul Ulama kelas menengah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya individu anggota Fatayat Nahdlatul Ulama yang bersangkutan juga bertujuan untuk meningkatkan sumber ekonomi. Respon yang diberikan oleh para perempuan anggota Fatayat Nahdlatul Ulama tersebut dinilai bagus dan sangat bermanfaat bagi mereka.

Di bidang sosial, kegiatan yang dilakukan antara lain: memberikan santunan kepada anak yatim dan fakir miskin, kaum dhuafa, bantuan untuk korban bencana alam, memberikan bantuan dana pendidikan, dan mengangkat anak asuh dari keluarga kurang mampu. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai instansi yang ada di Kabupaten Sidoarjo khususnya dan Propinsi Jawa Timur umumnya.

Secara umum tujuan di bidang sosial ekonomi yang ingin dicapai antara lain adalah memberikan pelayanan sosial, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama yang tergabung dalam organisasi perempuan Nahdlatul Ulama, memberikan pemberdayaan ekonomi kepada perempuan, serta mobilisasi dana dan pengelolaannya. Adapun cara yang dilakukan adalah melalui program: memberikan usaha nyata untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, memberikan bantuan proaktif terhadap korban ketidakadilan sosial, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang konsen dengan persoalan ketidakadilan sosial,

mengupayakan adanya *fundrising* bagi usaha dan kepentingan perempuan, mengembangkan usaha perempuan berbasis lokal kemasyarakatan, memberikan akses pemanfaatan fasilitas ekonomi yang tersedia di pemerintah maupun swasta untuk warga yang kurang mampu, merintis jaringan bisnis strategis yang mempermudah akses perempuan dan kelompok ekonomi lemah ke pasar bebas, membangun jaringan pemasaran produksi, kerajinan dan industri kecil dari pedesaan dalam satu kabupaten, serta mengembangkan kelompok usaha yang dapat mengakses sumber-sumber modal yang tersedia.

D. Peran di Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Di bidang kesehatan, perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama melalui organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama dan Muslimat Nahdlatul Ulama bekerjasama dengan BKKBN Pusat, BKKBN Pripinsi, Dinas Kesehatan, Badan Anti Narkoba, BKBPMP Pemkab Sidoarjo dan Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo melaksanakan kegiatan antara lain: mengadakan sosialisasi mengenai pengolahan limbah kering, mengadakan seminar mengenai deteksi dini terhadap penyakit kanker servix, mengadakan seminar tentang Multiple Intelegensia Anak, melakukan kegiatan papsmear bekerjasama dengan RSI Siti Hajar Sidoarjo, dan memberikan vaksinasi Hepatitis B kepada kaum perempuan.

Para perempuan ini juga mengembangkan pusat informasi dan kesehatan reproduksi (PIKER) dan berupaya untuk terus mengaktifkannya.

Upaya ini dilakukan untuk meminimalisasi jumlah penderita gangguan atau penyakit reproduksi di kalangan kaum perempuan.

Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak maka diadakan pemeriksaan papsmear, seminar kanker serviks, pemeriksaan darah serta kegiatan seminar multiple intelegensia anak. Kegiatan donor darah yang diikuti oleh masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan.

Terobosan lain yang dilakukan adalah mengupayakan bantuan pengobatan murah atau gratis untuk masyarakat, dengan demikian akses kesehatan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Ada pula rencana untuk membuat rintisan klinik kesehatan ibu dan anak, namun rencana ini belum dapat terlaksana dalam waktu yang dekat ini.

Para perempuan yang tergabung dalam Muslimat Nahdlatul Ulama juga mengupayakan berdirinya balai kesehatan di setiap wilayah kecamatan di mana banyak terdapat anggota Muslimat Nahdlatul Ulama. Di situ juga akan disediakan pelayanan kepada para pengurus dan terutama untuk kaum perempuan. Organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama juga memiliki sebuah Rumah Sakit di bawah naungannya yaitu Rumah Sakit Siti Hajar yang yayasannya dikelola oleh para perempuan anggota Muslimat Nahdlatul Ulama sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu FW (63 tahun) Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Sidoarjo:

“Sebenarnya sejak dulu Muslimat Nahdlatul Ulama itu sudah konsen dengan berbagai macam persoalan dalam masyarakat, antara lain di bidang kesehatan. Rumah Sakit Siti Hajar itu dulu didirikan oleh perempuan Muslimat Nahdlatul Ulama yang awalnya bernama Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) hingga menjadi rumah sakit seperti sekarang ini. Itu merupakan bentuk kepedulian para pengurus dan anggota Muslimat Nahdlatul Ulama kepada masyarakat”.

Upaya selanjutnya yang ingin dilaksanakan oleh para Muslimat Nahdlatul Ulama adalah pemberantasan bahaya narkoba dan zat adiktif (NAPZA) dan penularan virus HIV AIDS serta upaya untuk menanggulangi dan mengobati penyakit menular seperti penyakit lepra dan penyakit kusta.

Untuk keseimbangan hidup di lingkungan tempat tinggal, juga dilakukan upaya untuk mengadakan penghijauan lahan kosong yang ada dengan tanaman obat, tanaman boga dan tanaman hias. Sehingga penanaman tanaman-tanaman tersebut selain bermanfaat untuk penghijauan, hasilnya juga dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi dan juga untuk pengobatan.

Secara umum tujuan yang ingin dicapai di bidang kesehatan dan lingkungan hidup antara lain adalah peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungannya serta pengembangan dan pelayanan kesehatan. Tujuan tersebut ingin dicapai melalui program: meningkatkan

pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak serta kesehatan lingkungannya melalui pelatihan dan penyuluhan, mengembangkan Pusat Informasi Kesehatan (PIKER) untuk perempuan menjadi pusat pelayanan informasi kebutuhan dasar masyarakat yang berorientasi pada solusi terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan perempuan, membangun dan menguatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan untuk mengurangi pemanasan global berbasis keluarga, meningkatkan kesehatan keluarga melalui budidaya tanaman obat, mengupayakan dan meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi, serta melakukan penyadaran lingkungan terhadap masyarakat melalui pendidikan, aktifitas keagamaan dan dakwah.

E. Peran di Bidang Pendidikan

Di bidang pendidikan, bekerjasama dengan berbagai instansi seperti Dinas Pendidikan Jawa Timur, Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, dan Universitas Negeri Surabaya, telah melakukan upaya dan peran antara lain: mengadakan pelatihan *Hypno Teaching*, mengadakan kegiatan kejar paket A untuk para ibu-ibu yang belum bisa membaca dan menulis, mengadakan pelatihan Keaksaraan Fungsional, mengadakan seminar tentang pendidikan. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu pendidikan masyarakat melalui pendidikan luar sekolah.

Sedangkan bagi perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama mereka berupaya

untuk mengembangkan lembaga pendidikan yang telah mereka miliki di bawah bendera Muslimat Nahdlatul Ulama. Kejadiannya antara lain adalah mengupayakan berdirinya Taman Kanak-kanak Percontohan Muslimat Nahdlatul Ulama Tingkat Kabupaten disamping sekolah-sekolah lain yang telah berdiri di bawah naungan Muslimat Nahdlatul Ulama.

Program yang mereka canangkan di bidang pendidikan antara lain adalah peningkatan sumber daya manusia tenaga pendidik yang berkualitas sesuai standar pelayanan di seluruh sekolah di bawah naungan Muslimat Nahdlatul Ulama. Untuk meningkatkan kualitas guru, kegiatan yang dilakukan antara lain adalah pelatihan penyegaran kurikulum, pelatihan pembuatan perangkat mengajar, dan melakukan studi banding ke sekolah-sekolah lain. Program lain perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama adalah meningkatkan pelaksanaan program keaksaraan fungsional menuju tahap selanjutnya untuk masyarakat terutama kaum perempuan.

Program kegiatan keaksaraan fungsional ditujukan untuk masyarakat yang tidak bisa membaca, menulis dan menghitung. Kegiatan tersebut telah berjalan sekitar sepuluh tahun yang dimulai pada tahun 2003. Program keaksaraan fungsional berjalan dalam dua tahap, yang pertama adalah keaksaraan fungsional dasar dengan masa pelatihan 6 bulan, yang dilanjutkan dengan keaksaraan fungsional mandiri dengan masa pelatihan 3 bulan.

Saat ini program kerja yang menjadi perhatian utama adalah keaksaraan usaha mandiri dengan sasaran keterampilan individu. Keaksaraan usaha mandiri merupakan program lanjutan dari keaksaraan fungsional dasar. Jika pada program keaksaraan fungsional dasar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitung, maka pada program keaksaraan fungsional mandiri bertujuan selain kemampuan membaca, menulis dan berhitung juga untuk membekali peserta dengan berbagai keterampilan seperti membuat kue, menjahit baju, dan sebagainya. Sehingga diharapkan peserta pelatihan ini dapat memulai usaha berwiraswasta melalui keterampilan yang dimilikinya.

Dalam pelaksanaannya ternyata program keaksaraan fungsional ini (keaksaraan fungsional dasar dan keaksaraan usaha mandiri) ternyata tidak hanya diikuti oleh kaum perempuan saja, namun juga kaum laki-laki. Pada umumnya kegiatan pelatihan ini ditujukan untuk kalangan warga nadhliyin, namun demikian tidak ada larangan bagi siapa pun anggota masyarakat yang ingin mengikutinya. Pelatih dari kegiatan ini adalah anggota Fatayat Nahdlatul Ulama yang telah mendapatkan pelatihan khusus dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

Dari para anggota masyarakat yang mengikuti program ini ada beberapa yang menikmati hasil positif pelatihan ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan penelitian ini SA (46 tahun), yang menjabat sebagai Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama:

“Program Keaksaraan Usaha Mandiri yang telah dilakukan selama ini telah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat, karena program ini memberi penekanan pada keterampilan yang dimiliki seseorang. Sehingga ketika yang bersangkutan telah selesai mengikuti pelatihan dia bisa memberi nilai tambah untuk keluarganya terutama dalam hal perekonomian. Salah satu contohnya adalah di Desa Panjunan masyarakat dilatih membuat kue purut ayam, setelah selesai mereka mencoba membuat sendiri lalu kemudian menjualnya ke pasar. Sekarang alhamdulillah omzetnya sudah besar, dan itu memang tujuan kita mengadakan pelatihan supaya bisa bermanfaat.”

Secara umum tujuan yang ingin dicapai di bidang pendidikan adalah peningkatan kualitas perempuan dan kualitas pendidikan perempuan. Program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan itu antara lain adalah melalui pemberian pelatihan dan pendidikan untuk menjadikan perempuan sebagai pemimpin yang tangguh dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Aswaja.

F. Peran di Bidang Penerangan dan Dakwah

Sedangkan di bidang penerangan dan dakwah, para perempuan ini berupaya untuk mengembangkan lembaga Fordaf (Forum Da'iyah Fatayat Nahdlatul Ulama) dengan cara sosialisasi lembaga Fordaf dan mendelegasikan Da'iyah Fordaf pada pertemuan Fordaf Propinsi Jawa

Timur. Agar para da'iyah memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan umat serta terjaga keberlangsungan kaderisasinya, maka diadakan bahsul masail tentang simpan pinjam koperasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui dasar hukum dan pegangannya dalam memberikan ceramah atau dakwah di masyarakat.

Upaya untuk mengembangkan dan membekali para da'iyah Fatayat Nahdlatul Ulama dengan pemahaman ideology *ahlus sunnah wal jamaah* dalam upaya mengantisipasi ideologi trans nasional juga dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan workshop penguatan aswaja.

Para perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama ini juga membuat media komunikasi dan melakukan kerja sama dengan media cetak dan elektronik untuk menerbitkan bulletin Ifadah dan penerbitan tabloid di bawah naungan organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama. Selain itu juga dilakukan siaran radio dengan isi dialog interaktif dengan pemateri dari anggota Fatayat Nahdlatul Ulama.

Para perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam Fatayat Nahdlatul Ulama ini memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan menjadi narasumber atau pemateri acara dialog interaktif yang diadakan di Radio Suara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam acara "Cakrawala Perempuan dalam Dialog". Melalui acara ini para perempuan ini dapat memasukkan nilai-nilai dan muatan yang dapat memberikan nilai positif bagi masyarakat khususnya kaum perempuan. Kegiatan ini juga dapat menambah wawasan para pendengar

terutama kaum perempuan melalui materi yang disampaikan oleh para perempuan kelas menengah yang menjadi anggota Fatayat Nahdlatul Ulama.

Contoh materi yang diberikan oleh perempuan ini antara lain bagaimana menentukan langkah-langkah merenovasi rumah, bagaimanakah teknik-teknik untuk membawakan acara, bagaimana kiat-kiat berwirausaha, bagaimana teknik mendirikan koperasi, bagaimana mendidik anak menurut cara Islam, bagaimana peran Ibu dalam keluarga, bagaimana mengolah sampah menjadi rezeki, kiat-kiat menulis ilmiah, bagaimana urgensi pendidikan menurut Islam, pentingnya memahami bahasa, narkoba dan zak adiktif (NAPZA) dalam perspektif agama, materi mengenai kesadaran gender seperti analisis gender, peran perempuan dalam era globalisasi.

Dalam bidang dakwah organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama memiliki dua perkumpulan yaitu Hidmat atau Himpunan Da'iyah Muslimat dan IHM atau Ikatan Hajjah Muslimat. Kegiatan Ikatan Hajjah Muslimat merupakan kegiatan anak cabang atau kecamatan hingga ke ranting atau desa yang kegiatannya berlangsung setiap bulan sekali. Sedangkan di Himpunan Da'iyah Muslimat kegiatannya rutинnya adalah mengadakan Tabligh Kubro setiap satu bulan sekali. Pada acara Tabligh Kubro ada kegiatan semaan al Qur'an dari para hafidhah Muslimat dengan jumlah kurang lebih 100 orang yang diadakan bergantian di tingkat kecamatan dengan nama Hamalatil Qur'an.

Secara umum tujuan yang ingin dicapai di bidang dakwah ini adalah penguatan wawasan Islam Aswaja yang rahmatan lil alamin dan berperspektif gender serta pengembangan dakwah dan pemikiran keagamaan. Program kerja yang dilakukan antara lain adalah: mengembangkan dakwah Islam Aswaja yang rahmatan lil alamin serta berperspektif gender; mengembangkan strategi dakwah sesuai dengan kebutuhan masyarakat global; mengembangkan dakwah bil hal di daerah-daerah bencana, membuat media komunikasi yang efektif bagi anggota; mengembangkan kapasitas para da'iyah melalui forum da'iyah Nahdlatul Ulama; mengembangkan dakwah melalui media, baik cetak maupun elektronik; melakukan, mendorong dan memfasilitasi berlangsungnya forum-forum diskusi keagamaan; serta melakukan pembinaan dan kaderisasi terhadap da'i agar memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan umat.

G. Peran di Bidang Seni dan Budaya

Para perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama ini juga memiliki kepedulian yang perhatian yang tinggi di bidang kesenian, khususnya kesenian yang telah lama ada dan berkembang dalam masyarakat Nahdliyin antara lain dibaiah, manaqib, barzanji, yasinan, tahlil, wisata religi, ziarah kiai dan sebagainya. Oleh karena itu mereka berupaya untuk melestarikan bentuk-bentuk kesenian ini. Hal tersebut dilakukan mengingat pada saat sekarang ini kesenian tersebut sudah hampir tidak dilakukan masyarakat lagi.

Pertemuan pengajian rutin juga terus dilaksanakan oleh para perempuan Muslimat Nahdlatul Ulama secara rutin juga diadakan secara rutin kegiatan bahsul masail dan kemudian ikut serta menyosialisakannya. Perkumpulan para perempuan yang tergabung dalam organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama seperti Ikatan Haji Muslimat (IHM) juga terus ditingkatkan kualitasnya melalui pertemuan rutin. Acara sema'an Al Qur'an juga diadakan secara rutin setiap hari Jum'at pahing dan setiap bulan sekali diadakan sema'an kubro yang diikuti anggota Muslimat Nahdlatul Ulama di setiap kecamatan.

Untuk membina, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni budaya ala Nahdlatul Ulama maka perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama ini yang merupakan anggota Fatayat Nahdlatul Ulama mengadakan berbagai macam lomba seperti lomba paduan suara (mars), lomba qasidah rebana, mengadakan ziarah wali lima, mengadakan peringatan Isra' Mi'roj, peringatan Nuzulul Qur'an, mengadakan safari Idul Fitri, safari Idul Qurban, maulid Nabi, serta mengadakan halal bihalal.

Secara umum tujuan yang ingin dicapai di bidang seni dan budaya adalah ingin melestarikan nilai-nilai seni budaya Nahdlatul Ulama melalui upaya dengan membina, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni budaya Nahdlatul Ulama.

H. Peran dalam Lembaga Swadaya Masyarakat

Para perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama selain banyak berkiprah di organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama dan Muslimat Nahdlatul Ulama, mereka juga banyak yang turut berperan aktif dalam berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat. Contoh Lembaga Swadaya Masyarakat tempat mereka aktif dan berkiprah adalah Lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan FKUB (Forum Komunikasi antar Umat Beragama). Perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama yang menjadi informan dalam penelitian ini juga terlibat aktif dalam lembaga ini selain juga aktif dalam organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama.

1. Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dulunya bernama P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) merupakan lembaga yang terdiri dari beberapa organisasi seperti Fatayat Nahdlatul Ulama, Muslimat Nahdlatul Ulama, Nasiyatul Aisyiah, Gerakan Pemuda Anshor, Pusat Studi Wanita, perwakilan umat Kristiani, dan lain-lainnya. Lembaga ini memberikan perlindungan dan advokasi kepada perempuan dan anak di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Para perempuan Nahdlatul Ulama yang berada baik di organisasi fatayat maupun Muslimat merasa perlu untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam lembaga ini karena merasa ikut bertanggung jawab atas kondisi masyarakat terutama kaum perempuan, sebagaimana yang disampaikan Ibu SA (46 tahun), ketua Fatayat Nahdlatul Ulama:

“Kami di organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama dan Muslimat Nahdlatul Ulama bekerjasama dengan organisasi lainnya merasa perlu untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak melalui Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) karena masyarakat terutama kaum perempuan dan anak membutuhkan perlindungan dan bantuan itu. Contohnya adalah ketika ada pelecehan, pemerkosaan, KDRT, maka melalui lembaga P2TP2A kita bisa mengadvokasi dan melindungi mereka, memulihkan hak-hak mereka, kondisi psikis mereka serta menuntut hukum si pelaku. Dengan demikian masyarakat merasa aman dan terlindungi.”

Lembaga ini didanai sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Banyak kasus yang ditangani oleh lembaga ini seperti kasus pelecehan, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, kasus-kasus lainnya. Contoh kasus yang diselesaikan oleh lembaga

ini adalah kasus pelecehan siswi santri oleh guru mengaji di Daerah Tulangan dengan memperjuangkan hak-hak siswi yang bersangkutan. Lembaga ini mendukung agar pelaku diproses secara hukum dan hak-hak santri yang bersangkutan dipulihkan seperti sediakala.

Salah seorang perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama lain yang bernama AT (46 tahun) yang juga merupakan pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama mengungkapkan bahwa dirinya sudah terlibat aktif dalam Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mulai awal berdirinya lembaga ini di tahun 2002 hingga sekarang. Hal tersebut diungkapkan AT kepada peneliti:

“Saya mulai aktif di lembaga P2TP2A ini sejak awal berdirinya lembaga ini yaitu sejak masih bernama Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) hingga sekarang. Lembaga yang awalnya bernama P3A ini merupakan contoh program Kementerian Pemberdayaan Perempuan di masa kepemimpinan Ibu Khofifah Indar Parawansa ketika menjabat sebagai menteri.”

Beberapa instansi dan organisasi bekerjasama dengan lembaga ini antara lain Kepolisian, Rumah Sakit, Kejaksaan,

Pengadilan, Legislatif, Pengacara, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya. Ketika ada korban yang meminta bantuan lembaga ini, maka yang bersangkutan tidak dikenakan biaya sama sekali. Jika dulu lembaga ini yang menyosialisasikan keberadaannya, maka saat ini justru banyak pihak termasuk para korban yang melapor ke lembaga ini. Bahkan banyak korban dari luar Sidoarjo yang datang dan melaporkan masalahnya. Dengan banyaknya latar belakang dan profesi yang mendukung seperti pengacara, psikolog, bidan, dokter, aktivis dan sebagainya, keberadaan lembaga ini semakin dibutuhkan masyarakat.

Tugas lembaga ini antara lain adalah: memberikan pelayanan upaya perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui Ruang Pelayanan Khusus (*shelter*), melaksanakan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak serta produk-produk hukum tentang perlindungan hak azasi manusia, melakukan pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, melakukan pemantauan dan *trauma conselling* bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, serta membantu menyiapkan kemandirian sosial ekonomi korban perempuan dan anak bersama dinas atau instansi terkait.

Beberapa pelayanan yang diberikan lembaga ini kepada masyarakat tanpa dikenai biaya antara lain adalah pelayanan yang

tanpa henti yaitu berlangsung selama 24 jam, dapat diakses lewat email bagi mereka yang enggan datang ke tempat ini, konsultasi atau konseling juga dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkan, pendampingan korban, pelayanan medis atau pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), adanya pendampingan khusus, dan adanya *shelter* atau rumah aman bagi korban yang merasa jiwanya terancam atau kurang nyaman di tempat awal.

Lembaga yang menangani permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak di Sidoarjo ini bersifat terbuka bagi masyarakat dari berbagai golongan, agama, suku dan ras. Banyak peristiwa di Sidoarjo yang berkaitan dengan perempuan dan anak diselesaikan dan dicarikan jalan keluar oleh lembaga ini. Lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga yang tersedia untuk menangani kasus-kasus yang dihadapi kaum perempuan dan anak. Dan lembaga ini telah menjadi lembaga percontohan bagi banyak kasus di daerah-daerah lain. Di dalam lembaga ini terdapat *shelter* yang menjadi tempat penampungan sementara untuk anak dan perempuan yang bermasalah.

Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ini memiliki jaringan mulai dari tingkat kecamatan hingga ke desa-desa untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak serta mengatasi persoalan-persoalan yang

ditimbulkannya. Sebagaimana yang disampaikan Ibu AT (46 tahun) yang juga aktif pada divisi shelter di lembaga ini:

“Lembaga pemberdayaan perempuan yang kita miliki ini mempunyai jaringan hingga ke kecamatan sampai ke desa-desa, seperti jaring laba-laba. Setiap pengurus memiliki program masing-masing seperti saya kan aktif menjadi divisi *shelter*, yaitu apabila ada kasus yang berupa ancaman jika memerlukan proses di kejaksaan, pengadilan itu perlu rumah khusus atau tempat perlindungan yang namanya shelter (rumah aman). Jadi korban ke situ lalu kita beri bimbingan, saran, perlindungan dan advokasi.”

Contoh salah satu kasus yang ditangani lembaga P2TP2A adalah kasus anak yang diperkosa hingga hamil oleh bapak tirinya maka si anak ditempatkan sementara di *shelter*. Anak tersebut didampingi relawan P2TP2A, dibiayai hidupnya hingga melahirkan kemudian dinikahkan. Kondisi anak dipantau hingga anak tersebut menikah.

Prinsip-prinsip dasar pelayanan lembaga P2TP2A adalah: klien yang datang tidak dikenakan biaya apapun atas dampak layanan yang diperolehnya, kerahasiaan klien menjadi prioritas penting dalam masa penanganan, tidak ada perlakuan diskriminasi, pelayanan yang berkeadilan dan menghormati sisi kemanusiaan klien (martabat, harga diri dan lain-lain), pelayanan cepat atau tanpa

birokrasi yang mempersulit klien untuk memperoleh pelayanan, mendahulukan kepentingan dan kebutuhan klien, serta menghindari ketergantungan klien dengan membangkitkan sifat kemandirian baik dalam mengambil keputusan maupun dalam kehidupan klien pasca penanganan.

Para korban yang ditangani di lembaga ini akan dilayani dan dikawal permasalahan yang sedang dihadapi hingga tuntas. Korban yang menjadi klien di lembaga ini tidak dikenai biaya sepeser pun atau gratis khusus untuk masyarakat Sidoarjo, namun untuk masyarakat dari daerah lain yang ingin dilayani dikenakan biaya hanya untuk penyelesaian kasus. Jika dulu para korban enggan melapor atau yang melakukan tindakan aktif adalah lembaga ini, maka sekarang justru banyak korban atau keluarga dekatnya yang justru melaporkan masalah yang dihadapinya sebagaimana yang disampaikan ibu AT:

“Yang banyak aktif melapor sekarang ini adalah masyarakat sendiri. Dulunya kita yang aktif yang menjemput bola. Jadi sekarang korban yang datang ditemani keluarga dekatnya. Seperti kemarin ada kasus di Desa Wonoayu antara kepala sekolah dengan muridnya ada wali murid yang datang minta bantuan ya kita layani. Kita melayani kasus itu terutama untuk kasus anak itu secara tuntas. Sejak awal kasus itu muncul kita kawal, nanti kalau ke pengadilan kita temani. Jadi di P2TP2A

ini ada advokasi yang melayani, ada pengacara, ada dokter, ada bidan, semua lengkap. Semua dapat pelayanan tuntas”.

Berikut ini adalah data jumlah kasus-kasus yang telah ditangani P2TP2A mulai dari tahun 2004 hingga tahun 2009. Kasus yang ditangani bermacam-macam, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual (termasuk pemerkosaan, pencabulan, perilaku seksual), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan dalam hubungan kerja (KDK), broken home, kekerasan ekonomi, kekerasan terhadap anak (KTA), penganiayaan dan trafficking.

Lembaga P2TP2A ini tidak hanya melayani kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Sidoarjo saja. Jika ada korban dari kabupaten lain yang ingin mendapatkan pelayanan dari lembaga ini maka lembaga ini juga bersedia melayaninya namun dengan dikenakan biaya.

Tabel 2

Data Kasus yang Ditangani P2TP2A Tahun 2004-2009

NO	JENIS KASUS	2004		2005		2006		2007		2008		2009	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	KDRT (Termasuk Kekerasan Tdp Istri)	63	48	111	56	97	48	84	50	72	58,5	86	67,2
2	Kek. Seksual (Perkosaan, Pencabulan, Pel.Sek)	40	30	32	16	49	24	23	14	21	17	30	23,4

3	Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)	8	6	12	6	4	2	7	4	4	3	1	0,8
4	Kekerasan Dlm Hub. Kerja (KDK)	3	2	6	3	4	2	1	0,5	1	1	1	0,8
5	Broken Home	0	0	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kekerasan Ekonomi	4	3	10	5	2	1	6	3,5	2	2	2	1,6
7	Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	8	6	12	6	14	7	28	16,5	13	10,5	2	1,6
8	Penganiayaan	5	4	8	4	5	2	10	6	9	7	5	3,9
9	Trafficking	0	0	6	3	26	13	9	5,5	1	1	1	0,8
JUMLAH		131	100	198	100	201	100	169	100	123	100	128	100

Sumber: Data dari Lembaga P2TP2A Tahun 2011

2. Lembaga Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB)

Lembaga Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) merupakan lembaga sosial keagamaan yang membawahi berbagai elemen di masyarakat yang terdiri dari berbagai perwakilan agama. Anggotanya terdiri dari berbagai agama yang berjumlah enam agama antara lain, Islam yang diwakili oleh Fatayat NU, Muslimat NU, Lembaga Dakwah; agama Kristen Protestan; agama Kristen Katolik; Agama Hindu; Agama Budha dan Konghucu.

Beberapa perempuan Nahdlatul Ulama menjadi anggota lembaga ini dan aktif di dalamnya. Program kegiatan lembaga ini antara lain di bidang sosial seperti memberi bantuan kepada pihak

yang membutuhkan, menyosialisasikan adanya Undang-undang Keagamaan yang salah satu pasalnya mengatur tentang pembangunan rumah ibadah yang selama ini banyak mengundang perselisihan.

Lembaga ini melibatkan seluruh elemen yang ada di masyarakat dari berbagai macam agama yang berada di wilayah kecamatan hingga pelosok desa-desa. Pihak kecamatan (Camat) merupakan fasilitator dari lembaga ini. Tujuan didirikannya lembaga ini antara lain adalah untuk meminimalisir adanya konflik atau ketegangan yang terjadi antara berbagai pemeluk agama terutama di daerah yang penduduknya terdiri dari banyak agama.

Contoh kasus konflik atau perselisihan yang ditangani oleh lembaga Forum Komunikasi antar Umat Beragama antara lain adalah kasus pendirian gereja yang menimbulkan konflik di Daerah Pademonegoro Kecamatan Sukodono dan di Daerah Tropodo Kecamatan Waru. Lembaga ini berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dan berupaya memfasilitasinya. Konflik sering terjadi karena masyarakat umumnya kurang paham mengenai Undang-Undang Keagamaan yang mengatur pendirian rumah ibadah. Bahwa dalam pendirian rumah ibadah sekurang-kurangnya harus disetujui oleh 90 orang yang disertai dengan penyerahan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dan salah satu tugas

lembaga Forum Kerukunan antar Umat Beragama adalah menyosialisasikan peraturan ini.

Bagi perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam organisasi Fatayat dan Muslimat, pluralitas merupakan suatu keniscayaan, sehingga kondisi tersebut bukanlah suatu hal yang perlu diperdebatkan dan dapat menimbulkan perselisihan. Pendapat yang dikemukakan SA (46 tahun), Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo dan juga anggota pengurus lembaga Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) dapat menggambarkan kondisi tersebut:

“Kalau buat kita di Fatayat Nahdlatul Ulama, tidak ada masalah ketika berhubungan dengan agama lain karena bagi kita Agama Islam itu adalah agama yang *rahmatan lil alamin*. Jadi kita di fatayat tidak mendahulukan perbedaan, kita tetap saling membantu, saling berbagi dengan pemeluk agama lain. Saling berbagi dan membantu dalam hubungannya dengan sesama manusia, namun bukan dalam hal akidah.”

3. Lembaga GOW (Gabungan Organisasi Wanita)

Lembaga ini merupakan lembaga yang terdiri dari beberapa organisasi wanita seperti Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, Nasiyatul Aisiyah, perwakilan perempuan Kristiani, dan sebagainya. Sebagai organisasi yang terdiri dari

berbagai unsur, lintas agama yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka lembaga ini hanya bergerak dalam bidang sosial seperti pelatihan berbagai macam keterampilan, arisan, pemberian bantuan kepada pihak yang membutuhkan.

Tujuan didirikannya lembaga ini adalah agar tercipta kerukunan, kebersamaan dan toleransi di antara kaum wanita di Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis, agama dan golongan. Kegiatan yang dilakukan pun terbatas hanya pada masalah-masalah kemanusiaan dan sosial. Perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama pun aktif pula dalam organisasi ini dan berkiprah di dalamnya.

BAB IV

**PERAN PEREMPUAN KELAS MENENGAH NU DALAM
PENGUATAN CIVIL SOCIETY DI KABUPATEN SIDOARJO**

Perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama di Sidoarjo dalam penelitian telah menunjukkan peranannya yang besar di masyarakat. Kelas menengah menurut A.S. Hikam merupakan basis kelas sosial baru dari kebangkitan Islam di Indonesia. Perempuan kelas menengah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuai kriteria yang didefinisikan oleh Pierre Bourdieu bahwa seseorang atau suatu kelompok dapat dikatakan sebagai kelas tertentu atau kelas menengah jika memiliki modal atau capital yaitu ekonomi, sosial, kultural dan simbolik. Modal menurut pandangan Bourdieu tidak hanya dalam bentuk materi (ekonomi) saja, tetapi juga dapat berbentuk non materi seperti jaringan sosial, kultural dan simbolik.

Seseorang menurut Bourdieu meskipun tidak memiliki modal ekonomi akan tetapi jika memiliki jaringan sosial yang kuat, posisi yang bagus di masyarakat, pendidikan yang bagus, pengakuan yang bagus dari masyarakat maka dapat dikategorikan sebagai kelas tertentu. Modal sosial dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah sumber daya baik actual maupun potensial yang terhubung dengan kepemilikan jaringan atau relasi, yang telah terinstitusionalisasi dalam pemahaman dan pengakuan bersama.

Modal kultural adalah nilai-nilai yang bisa dipertukarkan yang merupakan akumulasi bentuk kultur yang berkembang dalam dunia sosial

misalnya pengetahuan yang dimiliki, kode-kode budaya, ijazah, kemampuan menulis, cara pembawaan, cara bergaul yang berperan dalam penentuan kedudukan sosial. Sedangkan modal simbolik menghasilkan kekuasaan simbolik, yaitu bentuk status atau pengakuan yang berwujud dalam bentuk obyektif atau institusi seperti gelar kiai, kesarjanaan, mobil mewah, kantor megah dan sebagainya.

Perempuan Nahdlatul Ulama yang dikategorikan sebagai kelas menengah dalam penelitian ini telah memiliki sejumlah modal sebagaimana yang dikemukakan Bourdieu, yaitu modal sosial, modal simbolik dan modal budaya. Modal sosial yang dimiliki para informan adalah jaringan yang luas karena mereka adalah pemimpin atau pengurus organisasi perempuan Nahdlatul Ulama, yaitu Muslimat dan Fatayat.

Modal budaya yang dimiliki antara lain adalah pendidikan yang mereka miliki adalah pendidikan tinggi. Mereka memiliki gelar sarjana strata satu hingga strata dua (*well educated*). Mereka juga memiliki kemampuan berbicara di depan umum dengan baik dan juga memiliki pergaulan yang luas.

Sedangkan untuk modal simbolik, para perempuan ini memiliki simbol-simbol kekuasaan seperti salah seorang dari mereka adalah Ibu Nyai, mereka menjadi pemimpin atau pengurus organisasi, maka otomatis status sosial mereka juga tinggi. Sehingga para perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama.

Tabel 3
Data Informan Berdasarkan Kategori Bourdieu

No	Modal Menurut Kategori Bourdieu	Bentuk
1.	Modal Sosial	Jaringan (link) yang luas
2.	Modal Budaya	Pendidikan S1 dan S2, kemampuan berbicara, pergaulan luas
3.	Modal Simbolik	Jabatan dalam organisasi (ketua, pengurus Muslimat dan fatayat NU), Gelar Bu Nyai

Para perempuan Nahdlatul Ulama tersebut berdasarkan pandangan Bourdieu termasuk dalam golongan kelas menengah sebagaimana Hefner yang menyatakan bahwa dalam masyarakat muslim melalui proses dialektika sosial, pendidikan, politik dan budaya antara sekelompok kalangan tertentu dengan mayoritas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari akan menghasilkan entitas lapisan sosial kelas menengah.

Daniel S. Lev berpendapat bahwa di Indonesia kelas menengahnya memiliki modal non materi seperti modal sosial, modal budaya, modal simbolik, asset organisasi dan sebagainya. Lev berpendapat bahwa basis kekuasaan kelas menengah Indonesia tidak berada di area korporasi kapitalis Negara karena mereka tidak memiliki otoritas yang bisa mengendalikan

kepemilikan alat dan produksi. Mereka memiliki basis sosial seperti asset organisasi sebagaimana yang dimiliki perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama tersebut. Para perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama tersebut memiliki modal sosial, modal budaya, modal simbolik seperti posisi atau jabatan mereka dalam organisasi, pengakuan dari masyarakat, kewibawaan, status sosial, charisma dan sebagainya.

Para informan dalam penelitian ini berdasarkan kategori Bourdieu dapat digolongkan sebagai perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama. Berdasarkan sejarahnya, kelas menengah Nahdlatul Ulama telah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia. Keberadaan kelas menengah Nahdlatul Ulama sesuai dengan apa yang dikatakan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bahwa keberadaan kelas menengah Nahdlatul Ulama dapat dilacak dan ditemukan dalam berbagai lapisan masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kelas menengah Nahdlatul Ulama secara umum berbeda dengan kelas menengah sebagaimana yang digolongkan para ahli barat dalam konteks Negara-negara Barat.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan telah mendorong anggota perempuannya untuk berkiprah dan berperan dalam masyarakat melalui wadah organisasi Muslimat dan Fatayat. Keberadaan sayap organisasi Nahdlatul Ulama ini dapat mewakili Nahdlatul Ulama dan bahkan pemerintah dalam menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi kaum perempuan. Organisasi Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama tidak hanya terbatas membahas dan menjawab berbagai persoalan yang dihadapi kaum perempuan,

tetapi juga berupaya mengantisipasi berbagai persoalan yang dihadapi anggotanya dan memberdayakan anggotanya.

Perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam wadah organisasi perempuan Nahdlatul Ulama, Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama telah memberikan sumbangan dan kontribusi yang besar kepada masyarakat melalui peran-peran yang mereka lakukan. Peran-peran tersebut dilakukan dalam bidang hukum, politik dan advokasi; bidang kesehatan; bidang sosial dan ekonomi; bidang pendidikan; bidang penerangan dan dakwah serta bidang seni dan budaya.

Di bidang hukum, politik dan advokasi, perempuan Nahdlatul Ulama yang dikategorikan sebagai perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama tersebut memiliki peran yang sangat besar. Mereka melakukan gerakan penyadaran hukum dan pendidikan politik masyarakat, mengadakan sosialisasi undang-undang seperti Undang-undang U Pilpres, Undang-undang Pemilukada, Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) dan *trafficking*, memberikan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan, melakukan pelatihan advokasi, mengadakan dialog interaktif dan testimony pencegahan kejahatan *trafficking* dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), melakukan gerakan penyadaran hukum dan pendidikan politik masyarakat khususnya perempuan, melakukan kajian kritis terhadap berbagai kebijakan hukum dan politik yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan dan berupaya menengmbangkan dengan lembaga atau instansi yang peduli dan terlibat dalam isu-isu perempuan.

Tujuan yang ingin dicapai di bidang ini adalah ingin menegakkan supremasi hukum, memberikan penguatan hak perempuan dan kebutuhan dasar bagi kehidupan serta memberikan pemberdayaan hukum dan penegakan keadilan bagi masyarakat.

Target kegiatan dan kiprah para perempuan di bidang hukum, politik dan advokasi ini adalah agar kaum perempuan mengerti tentang masalah politik dan menyadarkan kaum perempuan tentang masalah politik dan hukum. Peran yang dilakukan para perempuan yang tergabung dalam organisasi perempuan tersebut sesuai dengan pendapat Alagappa yang menyatakan bahwa keberadaan organisasi civil society bertujuan mendukung, membantu negara dalam memberikan pelayanan. Organisasi civil society juga berupaya untuk memformulasikan serta mengimplementasikan program mereka sendiri. Dalam hal ini organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama dan Fatayat Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi civil society.

Di bidang sosial dan ekonomi, para perempuan kelas menengah NU ini melakukan peranannya untuk memberikan pelayanan sosial, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, melakukan pemberdayaan ekonomi serta melakukan mobilisasi dana dan pengelolaannya. Adapun cara yang dilakukan antara lain adalah memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat khususnya kaum perempuan, baik yang berupa teknis seperti keterampilan-keterampilan maupun pelatihan dalam bentuk pengetahuan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pribadi dan usaha kaum perempuan.

Upaya lainnya adalah dengan mencari fundrising bagi usaha dan kepentingan perempuan, memberikan akses pemanfaatan fasilitas ekonomi yang tersedia di pemerintah maupun swasta, merintis jaringan bisnis strategis yang mempermudah akses perempuan dan kelompok ekonomi lemah ke pasar bebas, membangun jaringan pemasaran produksi, mengembangkan kelompok usaha yang dapat mengakses sumber-sumber modal yang tersedia, memberikan bantuan proaktif terhadap korban ketidakadilan sosial.

Di bidang kesehatan dan lingkungan hidup, para perempuan ini memiliki peran yang tidak sedikit. Mereka berupaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak, melalui cara antara lain dengan mengadakan pemeriksaan kesehatan, mengadakan seminar, memberikan vaksin, mengembangkan pusat informasi dan kesehatan reproduksi. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mengadakan bantuan pengobatan murah atau gratis untuk masyarakat dan merencanakan pendirian klinik atau balai pengobatan untuk ibu dan anak.

Sedangkan untuk masalah lingkungan hidup, para perempuan ini berupaya membangun dan menguatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan untuk mengurangi pemanasan global berbasis keluarga misalnya dengan mengadakan penghijauan lahan kosong dengan menanam tanaman obat, tanaman boga dan tanaman hias. Sosialisasi mengenai pengolahan limbah kering juga dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Di bidang pendidikan, para perempuan tersebut berusaha untuk meningkatkan kualitas perempuan dan kualitas pendidikan perempuan. Cara

yang dilakukan antara lain adalah mengadakan pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan *hypno teaching*, pelatihan keaksaraan fungsional bagi mereka yang buta huruf, pendidikan kejar paket A, mengadakan seminar tentang pendidikan. Sedangkan bagi perempuan di bawah organisasi Muslimat NU yang memiliki ratusan sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), mereka berupaya untuk meningkatkan sumber daya guru dan siswa sesuai standar pelayanan pemerintah. Untuk meningkatkan kualitas guru, mereka mengadakan kegiatan seperti pelatihan penyegaran kurikulum, pelatihan pembuatan perangkat mengajar dan melakukan studi banding ke sekolah-sekolah lain. Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk menjadikan perempuan sebagai pemimpin yang tangguh dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai *ahlusunnah wal jamaah*.

Di bidang penerangan dan dakwah peran yang dilakukan bertujuan untuk menguatkan wawasan Islam *ahlusunnah wal jamaah yang rahmatan lil alamin* dan berperspektif gender serta untuk mengembangkan dakwah dan berbagai pemikiran keagamaan. Kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan, mendorong dan memfasilitasi berlangsungnya forum-forum diskusi keagamaan, mengembangkan dakwah melalui media cetak dan elektronik, mengembangkan dakwah bil hal di daerah-daerah bencana, mengembangkan strategi dakwah sesuai kebutuhan masyarakat global, dan lain sebagainya.

Di bidang seni dan budaya, para perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama ini berperan dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai seni dan budaya Nahdlatul Ulama melalui upaya dengan membina,

mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni budaya Nahdlatul Ulama. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah mengadakan kegiatan dibaiyah, manaqib, barzanji, yasinan, tahlil, wisata religi, ziarah kiai secara rutin setiap dua minggu atau setiap satu bulan sekali untuk melestarikannya.

Kelompok kelas menengah muslim diharapkan peranannya dalam penguatan civil society. Sebagaimana salah satu fungsinya dalam Negara, civil society dapat menjadi mitra atau partner Negara dalam melaksanakan kepentingan publik. Civil society juga berfungsi untuk melengkapi dan mewadahi kebutuhan masyarakat. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh organisasi civil society tersebut telah dilaksanakan dan terejawantah oleh organisasi Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama dalam semua kegiatan dan program-programnya.

Perwujudan civil society dalam masyarakat dapat berupa asosiasi atau organisasi yang muncul secara sukarela, mandiri, rasional dan partisipatif baik dalam wacana maupun praksis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan. Hal tersebut dapat tercermin dari keberadaan organisasi Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai organisasi civil society.

Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai organisasi civil society sebagaimana dikatakan Alagappa telah berhasil mengembangkan peran dalam melaksanakan agenda reformasi dan penguatan sosial, membantu Negara dalam memberikan pelayanan dan memformulasikan serta mengimplementasikan program mereka sendiri. Usaha organisasi perempuan Nahdlatul Ulama tersebut

seperti memberi penyadaran politik dan hukum kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran kesehatan dan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, melakukan pemberdayaan ekonomi merupakan upaya organisasi civil society untuk menjadi partner atau mitra Negara dalam melaksanakan kepentingan publik. Ia juga dapat memainkan fungsinya untuk melengkapi dan mewedahi kebutuhan masyarakat.

Dalam Lembaga Swadaya Masyarakat, para perempuan kelas menengah NU juga memiliki peran yang sangat besar. Mereka terlibat aktif dalam lembaga yang melayani dan memberdayakan masyarakat khususnya para kaum perempuan. Pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), para perempuan tersebut ikut berperan aktif dalam melayani, mendampingi dan melindungi para korban kekerasan terutama perempuan dan anak. Para perempuan ini merasa terpanggil dan ikut bertanggung jawab atas kondisi masyarakat terutama kaum perempuan. Melalui lembaga ini para perempuan tersebut ingin memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak yang telah tercederai akibat tindakan kekerasan dan tercela lain yang dialami mereka.

Salah seorang informan dalam penelitian ini telah aktif di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mulai sejak awal berdirinya lembaga ini sampai sekarang. Ia aktif pada divisi *shelter* yang melindungi perempuan dan anak korban kekerasan di tempat sementara, rumah khusus tempat korban tinggal sementara ketika menunggu proses hukum

di pengadilan. Para aktivis lembaga ini biasa menggunakan istilah *shelter* atau rumah aman.

Lembaga Swadaya Masyarakat lain tempat para perempuan kelas menengah ini berperan aktif adalah Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB). Pada lembaga ini para perempuan tersebut memiliki kontribusi yang besar bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Mengingat keragaman agama, suku, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya, maka adanya lembaga-lembaga atau organisasi yang berupaya menjaga kerukunan umat beragama sangatlah patut untuk dihargai dan diapresiasi. Salah satu tugas lembaga ini adalah berupaya untuk menyosialisasikan adanya Undang-Undang Keagamaan yang salah satu pasalnya mengatur tentang pendirian rumah ibadah yang selama ini banyak menimbulkan perselisihan. Kontribusi perempuan-perempuan Nahdlatul Ulama di lembaga ini sedikit banyak membuktikan bahwa mereka memiliki peranan yang tidak bisa dianggap remeh dalam memberikan kesadaran masyarakat dan merupakan bentuk penguatan civil society.

Sumber daya organisasi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terutama yang dimiliki kaum perempuannya juga banyak mewarnai Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Timur dan Sidoarjo khususnya. Banyak Lembaga Swadaya Masyarakat yang diisi dan diinisiasi oleh kalangan yang tergabung dalam keanggotaan Nahdlatul Ulama seperti anak muda, perempuan, intelektual dan sebagainya. Selain wadah organisasinya sendiri seperti Muslimat dan Fatayat NU, kaum perempuan

tersebut banyak yang berhasil dalam berkiprah dan berperan dalam mensejahterakan masyarakat.

Kelompok civil society di Asia menurut Muthiah Alagappa memiliki fungsi jangkauan yang luas yang meliputi budaya, agama, pengembangan komunitas, kesejahteraan sosial, bahasa dan pendidikan, pengobatan dan kesehatan masyarakat, perlindungan konsumen, lingkungan, pengembangan ekonomi, hak-hak minoritas dan manusia, media, keadilan ekonomi dan politik. Peran-peran kelompok civil society sebagaimana yang dikemukakan Alagappa tersebut telah dijalankan oleh perempuan-perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama melalui wadah organisasi Fatayat dan Muslimat Nahdlatul Ulama.

Gagasan dan praktek penguatan civil society sejatinya merupakan salah satu alternative model perjuangan menuju demokratisasi dalam suatu Negara. Penguatan civil society merupakan salah satu agenda penting dalam usaha membangun demokratisasi di Indonesia. Dalam Negara demokratis, terdapat civil society yang merupakan ruang publik dimana beberapa individu berusaha membangun keterlibatan masyarakat yang otonom pada tingkatan yang berbeda-beda seputar isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Tatanan civil society menurut Alagappa ditemukan pada asosiasi yaitu sekelompok individu dalam masyarakat yang meyakini satu doktrin atau kepentingan tertentu dan memutuskan untuk merealisasikan doktrin atau kepentingan tertentu dan memutuskan doktrin atau kepentingan bersama tersebut. Asosiasi membawa individu keluar dari batas-batas kehidupan pribadi menuju proyek sosial yang berhubungan dengan ide partisipasi dalam sistem

demokrasi. Tatanan civil society merupakan bagian dari demokrasi yang ingin melahirkan hak-hak warga Negara dan menjamin terbukanya partisipasi secara terbuka.

Mengingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah kaum muslim, maka merupakan hal yang wajar jika orang-orang Muslim memainkan peranan positif dalam penguatan civil society dan demokrasi di Indonesia. Jika melihat dari kondisi yang ada sekarang ini maka umat Islam terutama yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama, yaitu kaum perempuannya melalui organisasi Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama memiliki peran yang signifikan bagi penguatan civil society di Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dari peran-peran yang selama ini mereka lakukan dalam organisasi dan lembaga swadaya masyarakat tersebut.

Sedangkan organisasi civil society menurut Alagappa seringkali memiliki fondasi komunal, keagamaan atau ideologis dan visi organisasi tertentu. Ia adalah para aktor sosial yang aktif dalam proses membangun Negara. Lembaga atau organisasi sosial keagamaan di Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan civil society. Taufik Abdullah menyatakan bahwa sejarah organisasi atau lembaga sosial keagamaan erat kaitannya dengan pembentukan civic kultur umat muslim di Indonesia. Organisasi sosial keagamaan di Indonesia telah menjalankan fungsinya sebagai organisasi civil society karena ia telah memberikan kesadaran politik dan memberikan kesadaran hak-hak dasar yang bersifat asasi sebagaimana fungsinya sebagai organisasi civil society.

Organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain sebagainya yang membangun *civility* para anggotanya dapat dikategorikan sebagai organisasi civil society. Organisasi civil society berada dalam dalam garis terdepan dalam mendorong transisi demokrasi. Mereka menurut Alagappa dapat menjadi kekuatan yang dapat memperkuat pemerintah atau justru dapat menjadi kekuatan untuk melawan pemerintah. Jika melihat kondisi real yang terjadi pada saat ini maka dapat dikatakan bahwa organisasi Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama menjadi kekuatan yang dapat memperkuat Negara. Ia dapat menjadi kekuatan penyeimbang dalam suatu Negara.

Organisasi civil society menurut Alagappa memainkan peran terdepan dalam menyebarkan dan memperdalam demokrasi di Negara-negara yang menganut sistem demokrasi, baik yang sedang mengalami transisi maupun yang telah lama menerapkan sistem ini. Peran-peran yang dilakukan beragam mulai dari menyuarakan kepentingan komunitas yang termarjinalkan, mendorong pendidikan dan sosialisasi demokrasi, memperluas jangkauan isu-isu pokok tentang pemerintahan demokratis, partisipasi dalam pemerintahan baik nasional maupun lokal, dan sebagainya. Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sejatinya memiliki potensi yang besar dalam membangun civil society di Indonesia.

Dalam kaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, civil society memiliki arti yang cukup penting, terutama bagi terwujudnya demokratisasi. Menurut Robert W. Hefner, civil society merupakan prasyarat terwujudnya demokratisasi. Dalam hal perekonomian, melalui civil society dapat dibangun

kegiatan dan hubungan ekonomi yang menciptakan kemandirian. Secara social, melalui civil society dapat dibangun keseimbangan kedudukan dan peran manusia sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dan peran-peran civil society tersebut telah dijalankan dengan baik oleh organisasi Nahdlatul Ulama melalui sayapnya yaitu organisasi Muslimat dan Fatayat NU.

Di alam demokrasi seperti sekarang ini, keberadaan civil society dapat dianggap sebagai syarat pembangunan demokrasi. Menurut Franz Magnis Suseno, bila didefinisikan secara luas, civil society merupakan masyarakat mandiri yang identik dengan demokrasi. Civil society merupakan suatu wilayah yang menjamin keberlangsungan perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jarring-jaring kelembagaan politik resmi. Terdapat ruang public bebas dimana komunikasi bisa dilakukan dengan bebas oleh setiap warga Negara.

Konsep civil society amatlah terkait dengan persoalan eksistensi, hak, peluang dan kemampuan masyarakat. Negara dalam hal ini bukanlah satu-satunya elemen penting dimana masyarakat dapat bergantung padanya. Civil society memandang penting kehadiran Negara, namun Negara tidak dalam posisi yang sangat dominan atau adi kuasa. Civil society berusaha menciptakan interaksi antara Negara dan masyarakat dengan hubungan yang interdependensi dimana keduanya saling mengisi dan saling menguntungkan satu sama lain. Hal penting yang melekat dalam civil society adalah adanya partisipasi public atau peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masyarakat yang mewarnai keputusan public. Organisasi Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama

dalam hal ini telah mengambil alih peran-peran yang semestinya dilakukan Negara seperti peran dalam bidang hukum dan politik, pendidikan, social ekonomi, kesehatan dan lingkungan, dan seterusnya.

Oleh Robert W. Hefner menggambarkan gagasan civil society mengacu pada organisasi-organisasi agama, kelompok-kelompok bisnis, serikat-serikat buruh, kelompok-kelompok yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan asosiasi-asosiasi lainnya dalam Negara.

Para ahli ilmu social seperti Robert Hefner dan Mitsuo Nakamura menyetujui bahwa organisasi-organisasi Islam memiliki potensi besar untuk berfungsi sebagai civil society. Mereka menyatakan bahwa civil society Islam telah menunjukkan eksistensinya sejak lama. Hefner menyatakan bahwa Islam di Indonesia memiliki sumber daya atau basis civility yang sangat kaya. Ia mencontohkan bahwa organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta organisasi Islam lainnya memiliki basis kewargaan yang sangat kuat di dunia.

Hefner dan Nakamura berpendapat bahwa organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang membangun civility para anggotanya merupakan civil society. Organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat lain dalam membangun civil society. Peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai lembaga civil society telah ditunjukkan sejak awal sejarah pembentukannya.

Pada saat ini, setelah era orde baru, organisasi Nahdlatul Ulama dan organisasi lainnya merupakan mitra atau partner pemerintah dalam menjalankan

kebijakan pemerintah dan juga program-program kerja mereka sendiri yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Selain sebagai mitra, organisasi civil society juga berfungsi sebagai penyeimbang setiap kebijakan dari program-program pemerintah.

Keberadaan organisasi seperti Nahdlatul Ulama dengan sayapnya Muslimat dan Fatayat merupakan wujud dari penguatan civil society di Indonesia. Posisi organisasi keagamaan ini menjadi penting bagi terlaksananya program pembangunan. Mereka menjadi mitra pemerintah dan menjadi bagian tak terpisahkan. Peran-peran mereka sangat besar termasuk melalui organisasi perempuan yang bertujuan untuk memberdayakan kaum perempuan seperti Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama.

Peran-peran yang dilakukan perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama sebagai bentuk penguatan civil society memperlihatkan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan tetap konsisten pada jalurnya sebagai organisasi yang memberdayakan masyarakat terutama kaum perempuan terutama pada basis akar rumput mereka. Hal tersebut juga mematahkan anggapan bahwa Nahdlatul Ulama telah meninggalkan peran-peran yang selama ini mereka mainkan sebagai pelengkap Negara. Salah satu tujuan atau target organisasi perempuan ini adalah meningkatkan kualitas perempuan Indonesia.

Berdasarkan kecenderungan seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam tubuh organisasi Nahdlatul Ulama tidak seperti yang dikemukakan para ahli selama ini bahwa organisasi Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang

konservatif dan tertutup.³⁶ Peran-peran yang dilakukan perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama tersebut menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai organisasi merupakan organisasi yang terbuka, modern dan memiliki peran penting dalam masyarakat.

Hal lain yang patut dicermati adalah bahwa peran-peran yang dilakukan perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama tersebut menunjukkan bahwa organisasi tersebut ternyata memiliki sumber daya manusia yang mumpuni yang tidak terbatas dan mampu berperan di dalam masyarakat. Nahdlatul Ulama sejak awal kelahirannya pada dasarnya merupakan organisasi masyarakat keagamaan yang tetap menjaga kemandiriannya. Sehingga mereka tetap bisa berupaya untuk memberdayakan, menjaga dan melindungi anggota mereka sendiri dari kebodohan, ketertinggalan, dan kekerasan, terutama kepada kaum perempuan.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, organisasi Nahdlatul Ulama dituntut untuk ikut memperjuangkan nilai-nilai universal seperti Hak Asasi Manusia (HAM) , pemberdayaan masyarakat, demokratisasi, keadilan social, yang berupaya memberikan penyadaran kepada masyarakat akan hak-hak mereka. Para perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama terus berupaya memperjuangkan nilai-nilai tersebut hingga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

³⁶ Bruinessen, Martin Van, 2004. "Kata Pengantar" dalam La Ode Ida, *NU Muda, Kaum Progresif dan Sekulerisme Baru*, Jakarta: Erlangga. Hal. xii

Peran perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama dalam masyarakat terutama di lapisan bawah di bidang hukum, politik, pendidikan, kesehatan, social, kesehatan, lingkungan, seni dan budaya tersebut timbul karena adanya kesadaran akan persoalan yang dihadapi masyarakat, hak-hak yang seharusnya diperoleh masyarakat. Ada kesadaran dari para perempuan tersebut bahwa mereka sebagai pemimpin memiliki tugas dan tanggung jawab tersebut, untuk melindungi hak-hak masyarakat.

Para perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama tersebut juga membangun hubungan dengan komunitas luar Nahdlatul Ulama dan juga kalangan non muslim, seperti bergabung dengan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) yang merupakan organisasi lintas agama dan lintas golongan. Hal tersebut menunjukkan bahwa anggota organisasi Nahdlatul Ulama telah memiliki pengalaman alami terhadap masalah social yang dihadapi bersama di tingkat akar rumput. Mereka juga dapat mengimplementasikan pemahaman agama mereka pada konteks nyata di masyarakat. Kerjasama perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama tersebut menunjukkan bahwa mereka mampu menangani masalah-masalah social yang dihadapi bersama, dengan melalui proses pendewasaan untuk menciptakan kebaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki.

Konsep demokrasi dan pemberdayaan Nahdlatul Ulama selama ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan bisa berperan sebagai kekuatan perubahan social dan juga telah tumbuh nilai-nilai

demokrasi dan kesadaran akan pentingnya peningkatan kualitas diri pribadi maupun organisasi, terutama pada organisasi perempuan Nahdlatul Ulama yaitu Muslimat dan Fatayat.

Keberhasilan peran-peran yang dilakukan perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama tersebut menunjukkan keberadaannya sebagai sayap organisasi keagamaan terbesar yang memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat yang berdaya dan berbudaya serta memperkuat eksistensi masyarakat melalui program-program yang dibuat dan kemudian dilaksanakan tersebut. Para perempuan ini ingin melakukan pemberdayaan kepada perempuan, khususnya anggota organisasi Nahdlatul Ulama dan masyarakat luas pada umumnya. Terdapat kesadaran dari para perempuan tersebut bahwa organisasi perempuan Nahdlatul Ulama haruslah menjadi motor penggerak perubahan (*agent of change*) dan demokratisasi masyarakat di tingkat local maupun di tingkat nasional.

Para perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama melalui Muslimat dan Fatayat berusaha untuk menjadi motor penggerak perubahan social dan demokratisasi yang merupakan fungsi dari civil society. Mereka berupaya menata kembali struktur masyarakat untuk bisa dijamin hak-haknya, dengan akses yang sedemikian besar mengingat besarnya jumlah anggota yang dimiliki organisasi ini. Dan hal tersebut merupakan bentuk penguatan civil society, seperti yang telah dilakukan oleh perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama, dengan modal yang dimilikinya, modal sosial, modal budaya, modal simbolik bahkan modal ekonomi memiliki peran yang besar dalam masyarakat dan dalam penguatan civil society di Sidoarjo. Peran-peran yang dilakukan tersebut meliputi berbagai bidang kehidupan seperti hukum, politik, pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan, serta seni dan budaya.

Peran organisasi Nahdlatul Ulama dalam Negara Indonesia sebagai civil society yang menjadi mitra atau partner Negara dalam melaksanakan kepentingan publik dan memainkan fungsinya untuk melengkapi dan mewedahi kebutuhan masyarakat telah dilakukan oleh perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama dalam hal ini adalah melalui sayap organisasi Nahdlatul Ulama yaitu Fatayat dan Muslimat Nahdlatul Ulama.

Sebagai organisasi yang seluruh anggotanya adalah kaum perempuan, Fatayat dan Muslimat Nahdlatul Ulama memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesadaran dan memberdayakan masyarakat khususnya perempuan. Para perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam organisasi Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama telah memperlihatkan peran mereka yang sedemikian besar dalam rangka

penguatan civil society di tingkat nasional pada umumnya dan tingkat lokal pada khususnya.

Prospek pembentukan civil society di Indonesia pada umumnya dan di kalangan umat Islam khususnya akan ikut diwarnai oleh keberhasilan organisasi Nahdlatul Ulama beserta banomnya sebagai kelompok transformative. Organisasi keagamaan dalam masyarakat dapat membantu masyarakat mengatasi permasalahan dalam lingkungan mereka sendiri melalui pendidikan, program pemberdayaan dan pemandirian dan pelatihan praktis lainnya. Organisasi kemasyarakatan dapat memaksimalkan perannya dalam masyarakat dan meminimalkan ketergantungannya terhadap Negara.

Melalui peran-peran yang dilakukan perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan dan pencerahan dilakukan oleh mereka dari dalam organisasi sendiri (pengurus organisasi Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama), mereka memiliki pendidikan dan pengetahuan yang tinggi serta pengalaman yang luas, lintas agama, lintas budaya, dan lintas golongan.

Para perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama tersebut melakukan aksi dan gerakan yang bersentuhan langsung dengan konteks hakekat kemanusiaan yaitu Hak Asasi Manusia, pemberdayaan dan demokratisasi. Nilai-nilai agama yang merupakan basis kultur Nahdlatul Ulama dipadukan dengan humanism dan nilai-nilai universal sesuai perkembangan zaman. Peran-peran yang dilakukan perempuan Nahdlatul Ulama tersebut tidak hanya dilakukan pada basis komunitas Nahdlatul

Ulama saja melainkan juga pada komunitas luar Nahdlatul Ulama sebagaimana kerjasama Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama dengan Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB) dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Hal tersebut merupakan gerakan inklusif yang mendasarkan pada nilai-nilai universal dan humanis serta demokratisasi.

Kerjasama perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama dengan kelompok lintas agama, lintas golongan dan lintas budaya yang dilakukan di luar komunitas Nahdlatul Ulama merupakan bentuk penghargaan akan nilai-nilai substansial dari hakekat kemanusiaan dengan tujuan untuk memelihara kebersamaan dalam masyarakat yang plural yang menunjukkan diri sebagai kekuatan civil society.

Peran-peran yang dilakukan perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama tersebut muncul dari kesadaran kritis akan kelangsungan hak-hak individu yang berangkat dari prinsip hakekat kebebasan manusia. Aksi yang dilakukan perempuan kelas menengah Nahdlatul Ulama tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan internalnya sendiri dalam hal ini adalah kebutuhan organisasi Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama maupun untuk kepentingan bermasyarakat dan bernegara.

Dari analisis kelas menunjukkan bahwa kelas menengah di Negara berkembang memiliki peran penting mengingat mereka merupakan harapan baru yang merepresentasikan inovasi dan perubahan yang potensial. Eksistensi kelas menengah yang kuat sebagaimana dikemukakan Lange dan

Meier³⁷, merupakan suatu kondisi penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kemajuan social di masyarakat.

B. Saran

Keberadaan organisasi civil society seperti Nahdlatul Ulama beserta badan otonomnya seperti Muslimat dan Fatayat Nahdlatul Ulama harus dikembangkan menjadi sebuah organisasi yang inklusif dan lebih terbuka. Sifat organisasi yang selama ini sudah relative terbuka, inklusif, moderat dan menekankan *civility* para anggotanya harus tetap dijaga dan terus dikembangkan.

Pemerintah dalam hal ini seyogyanya tidak mengintervensi, membatasi gerak organisasi tersebut dan justru harus mendukung keberadaan organisasi tersebut mengingat besarnya peran serta mereka dalam melengkapi peran pemerintah dalam masyarakat.

³⁷ Lange, Helmuth dan Lars Meier (eds), 2009. *The New Middle Classes: Globalizing Lifestyles, Consumerism and Environmental Concern*, German: Springer

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Moeslim. 2005. *Islam yang Memihak*, Yogyakarta: LKiS
- Abdurrahman, Moeslim. 2003. *Islam sebagai Kritik Sosial*, Jakarta: Erlangga
- Alagappa, Muthiah, 2004. *Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space*, California: Stanford University Press
- Budiman, Arief. 1994. "From Lower to Middle Class: Political Activites Before and After 1988". In David Bouchier and John Legge, eds., *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*, pp. 289-235. Melbourne: Center of Southeast Asian Studies Monash University
- Bourdieu, Pierre dan Lois J. Wacquant. 1992. *An Invitation to Reflexive Sociology*, University of Chicago Press
- Bruinessen, Martin Van, 2004. "Kata Pengantar" dalam La Ode Ida, *NU Muda, Kaum Progresif dan Sekulerisme Baru*, Jakarta: Erlangga.
- Dahrendorf, Ralf, 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa-Kritik*, Jakarta: Rajawali Press
- Gerth, HH dan C. Wright Mills (eds), *From Max Weber: Essays in Sociology* New York: Oxford University Press, 1946
- Haryatmoko, 2003. "Landasan Teoritis Gerakan Sosial menurut Bourdieu: Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa," dalam majalah BASIS no. 11-12 tahun ke-52
- Hefner, Robert W. 1993. "Islam, State, and Civil Society: ICMI and The Struggle for the Indonesia Middle Class". *Indonesia*. Number 56 (Oktober).
- _____. 1997. "Islamization and Democratization in Indonesia". In Hefner, Robert W. And Patricia Horvatich, eds., *Islam in an Era of Nation-States, Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press
- _____, 2001. *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS
- Heryanto, Ariel, 1993. "Memperjelas Sosok yang Samar" dalam Richard Tanter dan Kenneth Young (ed), *Politik Kelas Menengah Indonesia*, Jakarta: LP3ES.

- Hikam, Muhammad A.S. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES
- Hikam, Muhammad A.S. 2000. *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga
- Huntington, Samuel P., 1997. *The Clash of Civilization and The Remaking of World Order*, New York: Touchstone,
- Ida, La Ode, 2004. *NU Muda, Kaum Progresif dan Sekulerisme Baru*, Jakarta: Erlangga
- Kuntowijoyo. 1985. "Muslim Kelas Menengah Indonesia 1910-1950: Sebuah Pencarian Identitas". *Prisma* No.11, hal 35-51.
- Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: PT. Mizan Pustaka
- Lange, Helmuth dan Lars Meier (eds), 2009. *The New Middle Classes: Globalizing Lifestyles, Consumerism and Environmental Concern*, German: Springer
- Lay, Cornelis, 1997. "Kelas Menengah, Civil Society dan Demokrasi", *Jurnal Bina Darma*, UKSW, Salatiga No.54
- Marx, Karl dan Friedrich Engels, *Selected Works*, Vol. 1, Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1950
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mujani, Saiful, 2007. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: PT. Gramedia
- Nakamura, Mitsuo, 2001. *Islam and Civil Society in Southeast Asia*, Singapore: Singapore University Press,
- Pranowo, Bambang, 1998. *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, Jakarta: Adicita Karya Nusa
- Prasetyo, Hendro dan Muhanif Ali, dkk. 2002. *Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Ramage, Douglas E. 1995. *Politics in Indonesia. Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. London and New York: Routledge.

- Rao, Aparno. 1999. "The Many Sources of Identity: an Example of Changing Affiliations in Rural Jammu and Kashmir". *Ethnic and Racial Studies* Vol. 22, No.1 January
- Robison, Richard. 1993. "The Middle Class and The Bourgeoisie in Indonesia". In Richard Robison and David S.G. Goodman, eds., *The New Rich in Asia, Mobile Phones, McDonald's and Middle Class Revolution*. London and New York: Routledge
- Tanter, Richard dan Kenneth Young. 1993. *Politik Kelas Menengah Indonesia*, Jakarta: LP3ES
- Voll, John Obert, 2003. *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, Jakarta: Fokus Media
- Wahid, Abdurrahman, 1993. "Kelas Menengah Islam di Indonesia", dalam Richard Tanter dan Kenneth Young, *Politik Kelas Menengah Indonesia*, Jakarta: LP3ES
- Waters, Malcom. 1994. *Modern Sociological Theory*. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications
- Kompas, 8 Juni 2012



KEPUTUSAN REKTOR IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR : In.02/1/PP.00.9/ 292 /P/ 2013
TENTANG
BANTUAN PENELITIAN INDIVIDU, KOLEKTIF, KOMPETITIF DAN UNGGULAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2013
REKTOR IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan penelitian individu, kolektif, kompetitif dan unggulan di lingkungan IAIN Sunan Ampel, maka dipandang perlu memberikan bantuan penelitian yang dimaksud;
b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan penelitian tahun anggaran 2013
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Sunan Ampel ;
4. Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata 1 IAIN Sunan Ampel tahun 2012, Nomor : In.02.1/PP.00.9/917/ P/ 2012, tanggal 10 September 2012;
5. Keputusan Rektor IAIN Sunan Ampel, No. : In.02/1/KU.00/06A/P/2013 tanggal 03 Januari 2013, Tentang Standard Biaya Satker BLU IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun Anggaran 2013.
- Memperhatikan** : Surat Persetujuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLU (DIPA-BLU) IAIN Sunan Ampel Nomor : DIPA-025.04.2.423770/2013, tanggal 05 Desember 2012 :
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN SUNAN AMPEL TENTANG BANTUAN PENELITIAN INDIVIDU, KOLEKTIF KOMPETITIF, DAN UNGGULAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2013**
- Pertama** : Mencabut dan tidak memberlakukan lagi Surat Keputusan Rektor Nomor: In.02/1/PP.00.9/209a/P/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Bantuan Penelitian Individu, Kolektif, Kompetitif, dan Unggulan IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2013
- Kedua** : Memberikan bantuan penelitian Individu yang namanya tercantum dalam Lampiran I surat keputusan ini masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), bantuan penelitian kolektif sebagaimana pada Lampiran II surat keputusan ini masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah); bantuan penelitian kompetitif sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah); bantuan penelitian unggulan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- Ketiga** : Pencairan Bantuan Penelitian tersebut dilakukan secara bertahap melalui rekening penerima bantuan, tahap pertama untuk bantuan penelitian individu Rp.5.000.000,- , untuk bantuan penelitian kolektif Rp. 12.500.000,- untuk bantuan penelitian kompetitif Rp. 25.000.000,- dan untuk bantuan penelitian unggulan Rp. 25.000.000,- Tahap kedua untuk bantuan penelitian individu Rp.5.000.000,- untuk bantuan penelitian kolektif Rp. 12.500.000,- bantuan penelitian kompetitif Rp. 25.000.000,- dan bantuan penelitian unggulan Rp. 25.000.000,- , bantuan dibayarkan (Lunas) setelah penerima bantuan menyerahkan Laporan hasil penelitian;
- Keempat** : Kepada penerima bantuan penelitian harus menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Lembaga Penelitian selambat-lambatnya pada tanggal 22 Nopember 2013;
- Kelima** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA-BLU IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2013;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 September 2013

A.n. Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran
Wakil Pembuat Komitmen
Kantor Pusat IAIN Sunan Ampel



Dr. Zumrotul Mukaffa
NIP. 1970101519970320014

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
3. Kepala KPPN Surabaya II, Surabaya ;
4. Kepala Biro AKU IAIN Sunan Ampel, Surabaya;
5. Bendahara Pengeluaran IAIN Sunan Ampel, Surabaya;
6. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan.

1	2	3	4	5
134	Dr. Sri Warjiati, SH. MH	Syar'ah	Pandangan Ulama Atas Pasal 445 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kemungkinan Implementasinya pada kasus Euthanasia	10.000.000
135	Dr. Hj. Sri Astutik, M.Si	Dakwah	Nilai - Nilai Konseling Indigenous di Pesantren	10.000.000
136	Dr.Ahmad Yusam Thobroni, M.Ag	Tarbiyah	Konsep Pendidikan Kesadaran Lingkungan perspektif Al-Qur'an dan Hadis	10.000.000
137	Dr. H. Abu Azam Al Hadl, M.Ag	Syar'ah	Analisis Pemikiran Muhaddithin dan Usuliyin terhadap al-sunnah sebagai sumber Hukum Islam	10.000.000
138	Drs. Agoes Moh. Moefad, SH., M.Si	Dakwah	Komunikasi Antar Agama (Studi Etnografi Keluarga Beda Agama Di Surabaya)	10.000.000
139	Drs. Hamdun Sulhan, M.Si	Dakwah	Komunikasi Politik (Analisis Perencanaan sosialisasi Kampanye Politik DPW PKB Jatim)	10.000.000
140	Abdul Djalal, M.Ag	Ushuluddin	Wahdat al Shuhud ibn Ata Al Allah Al Sakandari	10.000.000
141	Drs. Anwar Rasyid, M.PdI	Tarbiyah	Ironi Madrasah Korban Lumpur Lapindo (Studi Kasus pada MA Khalid Bin Walid)	10.000.000
142	Mahir Amin, S.Ag., M.Fil.I	Syar'ah	Dinamika Demokrasi Dalam Kontestasi Poltik Lokal	10.000.000
143	Iva Yulianti Umdatul Izzah, M.Si	Dakwah	Peran Perempuan kelas menengah NU dalam penguatan Civil Society di Kabupaten Sidoarjo	10.000.000
144	Dra. Hj. Siti Dalliah Candrawati	Syar'ah	Ijin Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jombang dan Implikasinya terhadap Pernikahan Dini (Telaah Yuridis UU No.1/1974 dan UUNo. 23/2002)	10.000.000
145	Drs. H. Sumarkan, M.Ag	Syar'ah	Hegemoni Politik Dinasti dalam kajian fiqh siyasah dan hukum positif di Indonesia	10.000.000
146	Amin Tohari, S.Ag., MpdI	Dakwah	Tayub dalam perspektif Sosial Politik Islam di Desa Becok Kecamatan Kartoharjo Kab. Magetan	10.000.000
147	Muwahid, SH., M.Hum	Syar'ah	Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Korupsi (Sebuah Upaya progresip dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)	10.000.000
148	Drs. Hamim Rosyidi, M.Si	Dakwah	Religiusitas dan Kebermaknaan Hidup Dosen IAIN Sunan Ampel Menjelang Masa pensiun	10.000.000
149	Dr. Nikmah Hadiati S. SIP., M.Si	Dakwah	Komunikasi Spritual Sebagai Terapi Bagi Pasien (Studi Fenomenologi pada penanganan pasien yang menjalani perawatan Paliatif)	10.000.000
150	Dra. Luluk Fikri Zuhriyah, M.Ag	Dakwah	Tipologi Komunikasi Keluarga Da'i Berpoligami di Indonesia	10.000.000
151	Mohamad Thohir, M.Pd.I	Dakwah	Penerapan Instrumen Obat Hati untuk meningkatkan komitmen belajar mahasiswa	10.000.000
152	Dra. Hj. Siti Azizah Rahayu, M.Si	Dakwah	Layana akademik dengan peningkatan motivasi belajar pada fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya	10.000.000
153	Drs. Slamet Muliono Rejosari, M.Si	Ushuluddin	Islam Dan Konflik Keagamaan (Dinamika dan Konflik antara Kelompok Sayyid Dan Syaikh dalam Pemurnian Agama)	10.000.000
154	Sukanto, SH., MS.	Syar'ah	Demokrasi Dalam Masyarakat Multi Etnis Di Wilayah Tarakan-Kaltim	10.000.000
155	Dra. Lailatul Huda . M.Hum	Adab	Pelestarian Arsip Dalam sejarah "Masjid Ampel Dan Dampaknya dalam perdagangan Masyarakat Ampel Surabaya" 1905-1972	10.000.000
156	Nurul Asiyah Nadhifah, M.HI	Syar'ah	Polemik keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Status anak di luar kawin	10.000.000
157	Budi Ichwayudi, M.Fil.I	Ushuluddin	Kesetaraan Gender Di Lembaga Pendidikan Islam Pasuruan	10.000.000
158	Mohammad Ilyas Rolis, M.Si	Dakwah	Islam dan Teori Gerakan Sosial Baru (Telaah atas Proses Pembingkaihan (Framing) dan Budaya di Komunitas Muslim Yayasan Amanah Kota Probolinggo)	10.000.000
159	Prof. Dr. H. Mas'an Hamid, M.Pd	Adab	Aspek -Aspek Puisi dalam Al Qur'an: Kajian Sastra Al Qur'an	10.000.000
160	Wahyu Ilahi, MA	Dakwah	Komunikasi Gender Fatayat NU	10.000.000
161	Drs. Sulhawi Rubba, M.Fil.I	Dakwah	Metodologi Islamisasi Dalam Sejarah Dakwah di Kota Singkawang Kalimantan Barat	10.000.000